

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi  
Konsentrasi Akuntansi Dan Keuangan Syariah*

**Oleh :**

**RONNY. S**

NPM : 1820050029



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

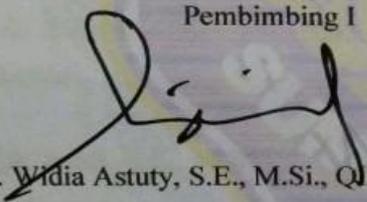
PENGESAHAN TESIS

NAMA : Ronny. S  
NPM : 1820050029  
PRODI : Magister Akuntansi  
KONSENTRASI : Akuntansi Dan Keuangan Syariah  
JUDUL TESIS : Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*  
Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah  
Di Indonesia

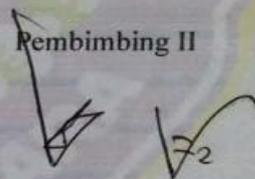
Pengesahan Tesis :  
Medan, Desember 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Pembimbing II

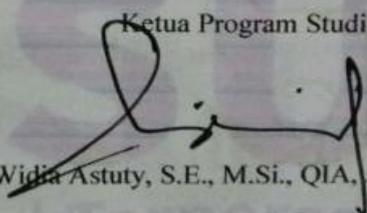
  
Dr. Irfan, S.E., M.M.

Diketahui

Direktur

  
Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi

  
Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk Oleh Magister Akuntansi PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam  
Ujian, Pada Hari Selasa, Tanggal 22 Desember 2020

Panitia Penguji

- |  |         |
|--|---------|
| 1. <u>Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA</u> | 1. .... |
| Ketua  |         |
| 2. <u>Dr. Irfan, S.E., M.M</u>                               | 2. .... |
| Sekretaris   |         |
| 3. <u>Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., M.Si., CA</u>         | 3. .... |
| Anggota  |         |
| 4. <u>Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA</u>                | 4. .... |
| Anggota  |         |
| 5. <u>Sri Rahayu, S.E., M.Si (Cand.Dr.)</u>                  | 5. .... |
| Anggota  |         |

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

### JUDUL TESIS

### **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Desember 2020  
Penulis,



**RONNY. S**  
NPM. 1820050029

# **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**RONNY. S**  
**NPM : 1820050029**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate covornance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Variabel terikatnya adalah *Return On Assets* (ROA). Variabel bebasnya adalah jumlah dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara dokumentasi, yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), dan website perusahaan perbankan syariah masing-masing. Dalam penelitian ini menggunakan sample sebanyak 12 BUS di Indonesia. Periode penelitian ini dilakukan enam tahun yaitu 2014 – 2019. Data sampel pada kegiatan ini berjumlah 72 data. Metode dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yang bersifat *asosiatif*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2017 – 2019, ROA mengalami peningkatan setiap tahun. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa secara bersama – sama atau simultan variabel bebas jumlah dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berupa ROA pada BUS di Indonesia. Secara parsial variabel bebas berupa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap terhadap kinerja keuangan berupa ROA pada BUS di Indonesia. Jumlah dewan direksi dan jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berupa ROA pada BUS di Indonesia, dan Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan berupa ROA pada BUS di Indonesia.

Kata Kunci : GCG, Jumlah Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Komite Audit, Jumlah Dewan Pengawas Syariah, ROA

**THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
MECHANISM ON FINANCIAL PERFORMANCE IN SHARIA  
COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA**

**RONNY. S  
NPM : 1820050029**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the effect of the good corporate governance mechanism on financial performance at Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia. The dependent variable is Return On Assets (ROA). The independent variable is the number of commissioners, boards of directors, sharia supervisory boards and audit committees. The research data was collected by means of documentation, which was obtained from the official website of the Financial Services Authority (OJK) at [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), and the websites of the respective Islamic banking companies. In this study, using a sample of 12 BUS in Indonesia. The research period was carried out for six years, namely 2014 - 2019. The sample data for this activity amounted to 72 data. The method in this study used associative quantitative methods. Based on the research results, it shows that from 2017 - 2019, ROA has increased every year. This study provides the results that collectively or simultaneously the independent variable number of the board of commissioners, board of directors, sharia supervisory board and audit committee has no effect on financial performance in the form of ROA on BUS in Indonesia. Partially the independent variable in the form of the number of commissioners has a negative effect on financial performance in the form of ROA on BUS in Indonesia. The number of boards of directors and the number of sharia supervisory boards has no effect on financial performance in the form of ROA on BUS in Indonesia, and the audit committee has a positive effect on financial performance in the form of ROA on BUS in Indonesia.*

*Keywords : GCG, Number of Board of Commissioners, Number of Board of Directors, Number of Audit Committee, Number of Sharia Supervisory Board, ROA*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karuniaNya dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya. Sholawat berangkai salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dikemudian hari kelak. Tesis adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program studinya di Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun tesis yang disusun berjudul **“PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

Tesis ini dapat selesai berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan yang diberikan dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan berikut fasilitas yang diberikan dengan baik.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Syaiful Bahri, M.AP atas kesempatan yang diberikan dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.

3. Ibu Ketua Prodi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak, CA, CPA, sekaligus Dosen Pembimbing I yang memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Irfan, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan ini hingga akhir.
5. Terkhusus Orang tua tercinta, H. Syamsuddin dan Hj. Rosnelly Tanjung yang dengan kasih sayangnya dari kecil hingga saat ini masih terus dan tetap memberikan bimbingan dan motivasi untuk terus menimba ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan.
6. Isteri terkasih, Mafdalina Pohan, SE, yang memberikan dukungan penuh dalam melanjutkan perkuliahan pada program pascasarjana magister akuntansi ini hingga selesai dan anak – anak saya M. Ghani Alkhair. S dan Balqis Arysna Salsabila yang menimbulkan semangat bagi saya untuk melanjutkan dan menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Prodi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan tulus memberikan ilmunya dan pengajaran yang bermanfaat.
8. Bapak/Ibu Karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam

perkuliahan hingga selesai.

9. Teman-teman MAKSI 2018/II seperjuangan yang banyak memberikan dukungan, saling mengingatkan dan berjuang untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
10. Abang, kakak dan adik-adik tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam melaksanakan perkuliahan ini hingga selesai.
11. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan bantuan moril maupun materil hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

Akhir kata, saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak atas bantuannya dan teriring doa saya sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas amal baik yang telah diberikan kepada saya dengan tulus dan ikhlas dan kiranya kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan dapat melewati pandemi atau wabah covid 19 ini dengan baik dan sehat, aamiin.

Medan, 22 Desember 2020

**Ronny. S**  
NPM.182050029

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Pembatasan Masalah.....	15
1.4. Rumusan Masalah.....	15
1.5. Tujuan Penelitian.....	16
1.6. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	18
2.1.1. Kinerja Keuangan.....	18
2.1.1.1. Rasio-Rasio Kinerja Keuangan.....	20
2.1.1.2. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	21
2.1.1.2.1. <i>Profitabilitas</i> .....	22
2.1.2. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	24
2.1.3. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	27
2.1.3.1. Dewan Komisaris.....	29
2.1.3.2. Dewan Direksi.....	32
2.1.3.3. Dewan Pengawas Syariah.....	34
2.1.3.4. Komite Audit.....	38
2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	40
2.3. Kerangka Konseptual.....	45
2.4. Hipotesis.....	49
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	50
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
3.3. Populasi dan Sampel.....	51
3.3.1. Populasi.....	51
3.3.2. Sampel.....	52
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	53
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.6. Teknik Analisis Data.....	58
3.6.1. Statistik <i>Deskriptif</i> .....	59
3.6.2. Analisis Regresi Berganda.....	59
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	60
3.6.4. Uji Hipotesis.....	64
3.6.5. Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	66
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	67

4.1.1. Deskripsi Data.....	67
4.1.1.1. Jumlah Dewan Komisaris.....	68
4.1.1.2. Jumlah Dewan Direksi.....	70
4.1.1.3. Jumlah Dewan Pengawas Syariah.....	72
4.1.1.4. Jumlah Komite Audit.....	73
4.1.1.5. <i>Return On Assets</i> (ROA).....	75
4.1.2. Hasil Uji Persyaratan Analisis.....	77
4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	78
4.1.2.1.1. Uji Normalitas.....	79
4.1.2.1.2. Uji <i>Multikolinieritas</i> .....	83
4.1.2.1.3. Uji <i>Heterokedastisitas</i> .....	85
4.1.2.1.4. Uji <i>Autokorelasi</i> .....	86
4.1.2.2. Uji Regresi Berganda.....	87
4.1.3. Hasil Uji Hipotesis.....	89
4.1.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T).....	90
4.1.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	91
4.1.3.3. Uji <i>Koefisien Determinasi</i> ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	92
4.2. Pembahasan.....	93
4.2.1. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	93
4.2.2. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	96
4.2.3. Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	97
4.2.4. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	99
4.2.5. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	100
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran.....	103

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kinerja Keuangan (ROA) BUS Tahun 2014-2019.....	5
Tabel 1.1.1.	ROA BUS Tahun 2014-2019.....	5
Tabel 1.1.2.	Jumlah Dewan Komisaris BUS Tahun 2014-2019.....	10
Tabel 1.1.3.	Jumlah Dewan Direksi BUS Tahun 2014-2019.....	11
Tabel 1.1.4.	Jumlah DPS BUS Tahun 2014-2019.....	12
Tabel 1.1.5.	Jumlah Komite Audit BUS Tahun 2014-2019.....	13
Tabel 2.2.	Penelitian Yang Relevan.....	40
Tabel 3.2.	Waktu Penelitian.....	51
Tabel 3.3.2.	BUS Yang Mempublikasikan Laporan Tahunan 2014-2019...	53
Tabel 3.4.	Operasional Variabel.....	54
Tabel 3.4.4	Peringkat Penilaian ROA.....	57
Tabel 4.1.	Deskripsi Data Objek Penelitian.....	68
Tabel 4.2.	Deskripsi Data BUS Sebagai Objek Penelitian .....	68
Tabel 4.3.	Deskripsi Data Jumlah Dewan Komisaris 2014-2019.....	69
Tabel 4.4.	Deskripsi Data Jumlah Dewan Direksi 2014-2019.....	71
Tabel 4.5.	Deskripsi Data Jumlah Dewan Pengawas Syariah 2014-2019..	73
Tabel 4.6.	Deskripsi Data Jumlah Komite Audit 2014-2019.....	75
Tabel 4.7.	Deskripsi Data <i>Return On Assets</i> 2014-2019.....	76
Tabel 4.8.	Deskripsi Statistik Data Penelitian.....	77
Tabel 4.11.	Hasil SPSS Uji Kolmogorov Smirnov.....	82
Tabel 4.12.	Uji <i>Multikolonieritas</i> .....	84
Tabel 4.14.	Uji <i>Durbin Watson</i> .....	87
Tabel 4.15.	Hasil Output Regresi Berganda.....	88
Tabel 4.16.	Hasil Output Uji F.....	91
Tabel 4.17.	Hasil Output Determinasi.....	93

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan bank syariah menunjukkan *trend* yang positif dan peningkatan dari tahun 2014 - 2019. Kinerja perbankan syariah menunjukkan perbaikan dalam pengelolaannya, namun peningkatan kinerja ini masih di bawah kinerja Bank Umum Konvensional. Kinerja keuangan perbankan syariah pada Juni 2020 tumbuh sebesar 9,22% dari industri perbankan di Indonesia atau total aset Rp.545,4 Triliun. Dan Bank Umum Syariah (BUS) mempunyai aset mencapai Rp.356,33 Triliun. Dengan kondisi penduduk muslim terbanyak di Indonesia seharusnya kinerja bank syariah dapat lebih baik dari bank umum konvensional atau minimal sejajar.

Pembahasan mengenai kinerja menurut Ahmad Zarkasyi (2016;141) tercantum didalam Alquran sebagaimana Firman Allah SWT pada QS. Al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Firman Allah SWT yang lain terkait dengan kinerja adalah QS. At-Taubah Ayat 105 ;

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

[Type here]

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Pembahasan terkait kinerja lainnya seperti yang disampaikan Ahmad Zarkasyi (2016; 141) yang terdapat didalam Alquran sebagaimana Firman Allah SWT pada QS.Al-Ahqaf Ayat 19;

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.

Imam Muslim dalam Ahmad Zarkasyi (2016; 142) menyebutkan hadist Nabi Muhammad SAW tentang kinerja antara lain:

إن هلا عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan "tepat, terarah dan tuntas".

Firman Allah SWT dalam ayat Alquran dan hadits Nabi Muhammad SAW diatas, menjelaskan bahwa didalam Alquran dan hadist terdapat ayat dan hadist yang menjelaskan tentang kinerja sehingga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal dan sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadist.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank Umum Syariah mempunyai peran dalam menghimpun dana dari nasabah/masyarakat yang mempunyai uang yang berlebih (pendanaan) dan menyalurkannya kepada nasabah/masyarakat yang memerlukan

[Type here]

uang (pembiayaan).

Saifi (2019; hal 5) menjelaskan mengenai “kinerja keuangan yang salah satunya merupakan alat ukur dalam suatu perusahaan untuk mengukur kualitas keuangannya”. Pratiwi (2018; hal 33) “Kinerja menurut istilah yang dipakai bagi seluruh maupun sebagian kegiatan organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar misalnya biaya yang telah lalu yang diproyeksikan dengan tujuan efisiensi, tanggung jawab termasuk akuntabilitas dari manajemen maupun sejenisnya”.

Fadillah (2017 ; hal 39) “tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keberhasilan yang merupakan suatu prestasi bagi manajemen. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu dari jumlah kinerja perusahaan”. Maith (2013; hal 620) menyampaikan bahwa kinerja keuangan yang baik dapat diketahui dari rasio-rasio keuangan antara lain yaitu rasio *likuiditas* merupakan kewajiban jangka pendek dengan jaminan aset lancarnya yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan perusahaannya, *solvabilitas* rasio adalah semua kewajibannya yang harus dipenuhi perusahaan dengan aset yang dimilikinya, aktivitas rasio kemampuan dan efektifitas perusahaan ketika mempergunakan asetnya. *Profitabilitas* rasio adalah bagaimana badan usaha mendapatkan keuntungan dengan *capital* yang dimilikinya.

Riyadi (2006) dalam Pudail dkk (2018; hal 135), “ROA merupakan persentase yang menentukan besarnya profitabilitas bank syariah yang dibandingkan antara profit sebelum pengenaan pajak dengan seluruh aset perbankan syariah dan ROE atau *Return on Equity* yang sama dengan ROA

[Type here]

digunakan untuk menentukan tingkat *profitabilitas*, tetapi perbedaannya adalah ROE dihitung menggunakan perbandingan besarnya *profit* setelah pajak dengan modal inti bank syariah”. Dari rasio – rasio kinerja keuangan diatas, penulis akan melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui keadaan badan usaha/perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yaitu *profitabilitas* rasio. Dalam rasio profitabilitas terdapat 2 (dua) komponen alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan yaitu *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA).

Pada pembahasan ini, kinerja BUS adalah ROA. Karena ROA menggambarkan bagaimana manajemen dapat memanfaatkan aset bank untuk menghasilkan laba secara optimal. Puspitasari & Ernawati (2010; hal 195) menjelaskan bahwa “ROA merupakan jumlah dari kemampuan pengelola badan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari aset yang dikelola”.

Tarigan & Prawihatmi (2015; hal 134) menjelaskan bahwa “tinggi rendahnya ROA dapat menggambarkan seberapa besar efisiensi penggunaan modal dan turun atau naiknya pendapatan”. Firmansyah (2006) dalam Tarigan & Prawihatmi (2015; hal 134) menjelaskan bahwa “ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi terhadap total aktiva yang dimiliki”.

Gitman (2003) dalam Puspitasari & Ernawati (2010; hal 195) “*Return on Asset* (ROA) adalah jumlah keefektifan aset suatu badan usaha yang dipakai untuk memperoleh pendapatan ataupun laba”. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan manajer untuk mengelola sumber daya entitas bisnis. Permasalahan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang ditemukan saat melakukan penelitian

[Type here]

pendahuluan adalah adanya *Return on Assets* (ROA) BUS yang negatif dan cenderung *berfluktuatif* dari Desember 2014 – Desember 2019 yang menunjukkan bahwa ROA yang diperoleh BUS tidak stabil.

Tabel 1.1. Kinerja Keuangan (ROA) BUS Tahun 2014 –2019

No	Nama	Persentase					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<i>Return on Assets</i> (ROA)	0,80%	0,49%	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%

Sumber : Data diolah, 2020.

Tabel 1.1. diatas, menggambarkan bahwa secara umum performa BUS memperlihatkan *trend* positif namun jika diperhatikan maka trend tersebut menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dan terdapat nilai negatif dari beberapa BUS sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja agar meningkat lebih baik dan lebih stabil. Dari data diatas dapat dilakukan rincian lebih lanjut terkait ROA untuk masing – masing BUS sebanyak 14 BUS. Berikut tabel rincian ROA BUS tahun 2014 – 2019 selama 6 tahun dari 14 BUS.

Tabel 1.1.1. ROA BUS Tahun 2014 - 2019

No.	NAMA BANK	<i>Return On Assets</i>					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	0.72%	0.25%	-8.09%	-5.69%	0.54%	0.60%
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	4.23%	5.20%	9.00%	11.20%	12.40 %	13.60 %
3	Bank Mega Syariah	0.29%	0.30%	2.63%	1.56%	0.93%	0.89%
4	Bank Muamalat Indonesia	0.17%	0.20%	0.22%	0.11%	0.08%	0.05%
5	Bank Syariah Bukopin	0.27%	0.79%	-1.12%	0.02%	0.02%	0.04%
6	Bank Syariah Mandiri	-0.04%	0.56%	0.59%	0.59%	0.88%	1.69%
7	Bank Victoria Syariah	-1.87%	-2.36%	-2.19%	0.36%	0.32%	0.05%
8	Bank Central Asia Syariah	0.80%	1.00%	0.80%	1.20%	1.20%	1.20%

[Type here]

9	Bank Negara Indonesia Syariah	1.27%	1.43%	1.44%	1.31%	1.42%	1.82%
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	0.08%	0.77%	0.95%	0.51%	0.43%	0.31%
11	Maybank Syariah Indonesia	3.61%	-20.13%	-9.51%	5.50%	-6.86%	11.15 %
12	Bank Panin Dubai Syariah	1.99%	1.14%	0.37%	-10.77%	0.26%	0.25%
13	Bank Aceh Syariah	-	-	2.48%	2.51%	2.38%	2.33%
14	Bank NTB Syariah	-	-	-	-	1.92%	2.56%

Sumber : data diolah, 2020

Gambaran tabel 1.1.1 menjelaskan ROA ke 14 BUS *berfluktuatif* atau cenderung tidak stabil dan terdapat ROA dari beberapa BUS yang bernilai negatif sehingga dimungkinkan untuk diteliti mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). PBI No. 11/33/PBI/2009, menyebutkan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*) dan kewajaran (*fairness*).

Kangmartono dkk (2018; hal 103) mengungkapkan bahwa “GCG menjadi salah satu faktor kesuksesan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dan memenangkan persaingan global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi perusahaan terbuka”. Tarigan & Prawihatmi (2015; hal 127) “Dalam BUS ada prinsip yang terkait dengan syariah dalam mendukung prinsip GCG tersebut yaitu kejujuran (*siddik*), menyampaikan (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), kecerdasan (*fathonah*). Teori keagenan merupakan hal yang melatar belakangi munculnya GCG, yang timbul saat pemilik perusahaan dan manager memiliki beda kepentingan memberikan

[Type here]

kewenangan kepada “*professional managers*”. Puspita & Ernawati (2010; hal 190) menyatakan “*Corporate governance* berkaitan erat dengan mekanisme dalam suatu badan usaha di mana berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap badan usaha itu agar memberikan kepastian terkait manajer dan internal badan usaha lainnya untuk memberikan kontribusi bagi *stake holder*”. Arifin (2005) dalam Tarigan & Prawihatmi (2015; hal 130) menjelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* terhadap bank dapat dilakukan melalui suatu mekanisme dan metode kerja. *Good corporate governance* merupakan mekanisme dari prosedur, aturan ataupun ketentuan yang jelas dan merupakan keterikatan antara para pihak dalam membuat suatu putusan dengan baik dengan kontrol dan pengawasan dari keputusan tersebut. Menurut Sari (2012; hal 26) bahwa “fenomena penyebab kurang berhasilnya *good governance* yang terjadi di Indonesia disebabkan pemerintah yang kurang dalam memberikan perhatian terhadap budaya organisasi”.

Onasis & Robin (2016; hal 2) menjelaskan “Nilai dari perusahaan dapat ditingkatkan jika pemegang saham dan pemangku kepentingan saling mendukung dengan baik untuk penentuan keputusan dengan tepat dengan mengoptimalkan permodalan dan penerapan mekanisme *good corporate governance*”. Santoso (2010; hal 126) menerangkan bahwa “mekanisme yang memberikan aturan hubungan antara fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan merupakan bagian yang cukup penting dalam penata kelolaan perusahaan”.

Velnampy (2013) dalam Onasis & Robin (2016; hal 2) menyebutkan “manajemen perusahaan tidak selamanya bertindak seperti yang diharapkan dan

[Type here]

untuk kepentingan perusahaan namun terkadang melakukan tindakan untuk pihak manajer sendiri”. Menurut Sutedi (2012) dalam Nizamullah dkk (2014; hal 43) menyebutkan “Suatu sistem dalam pengaturan dan pengendalian perusahaan untuk menciptakan *value added* atau nilai tambah kepada semua pemegang saham adalah *good corporate governanace*”.

GCG dapat berpengaruh dalam naik turunnya performa badan usaha, masalah ini dapat diketahui dari beberapa penelitian seperti Santoso (2010; hal 134) dengan judul “pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja menunjukan hasil penelitiannya bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan”.

Dari uraian diatas, maka mekanisme tata kelola perusahaan (GCG) terhadap kinerja keuangan pada penelitian ini adalah:

1. Jumlah dewan komisaris, dimana dewan komisaris adalah organ perusahaan yang mempunyai kewenangan dalam memperbaiki struktur termasuk dalam hal pengelolaan organisasi. Dewan Komisaris merupakan organ penting dalam perusahaan yang mengawasi jalannya perusahaan secara baik dan benar, juga merupakan organ perusahaan yang memberikan nasehat kepada direksi agar perusahaan menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan rencana bisnis bank dan pengelolaan perusahaan atau badan usaha yang baik. Dewan Komisaris sesuai PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana

[Type here]

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tarigan & Prawithatmi (2017; hal 128) menjelaskan “Dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Mekanisme *Eksternal* dan *Internal*. Mekanisme faktor *eksternal*, yaitu pelaksanaan kontrol perusahaan dan mekanisme terhadap pasar. Mekanisme faktor *Internal*, melakukan pengendalian terhadap perusahaan melalui proses internal dan struktur seperti rapat pemegang saham, susunan direksi, dewan komisaris”.

Pasal 25 PBI No. 11 / 3 / PBI / 2009 mengenai Bank Umum Syariah disimpulkan banyaknya anggota Dewan Komisaris paling kurang berjumlah 3 (tiga) orang dan mempunyai anggota paling banyak sama atau sesuai dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan menghasilkan pendapat yang berbeda. Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menyatakan “pengawasan semakin efektif apabila jumlah dewan komisaris semakin besar”.

Dari pendapat diatas, jumlah dewan komisaris menjadi sangat penting terhadap kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik. Jumlah dewan komisaris BUS di Indonesia tercermin dari tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang jumlah / jumlah dewan komisaris pada 14 BUS di Indonesia. Dari tabel dibawah, dapat diperoleh informasi terkait jumlah dewan komisaris cenderung mengalami penambahan untuk beberapa BUS dan jumlah yang tetap untuk beberapa BUS yang lain. Dari data tersebut

[Type here]

penulis akan melakukan penelitian apakah jumlah dewan komisaris yang cenderung meningkat tersebut mempengaruhi ROA BUS.

Tabel 1.1.2. Jumlah Dewan Komisaris BUS Tahun 2014-2019

No	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	4	4	4	3
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3	3	3	4	4	3
3	Bank Mega Syariah	3	3	3	3	3	3
4	Bank Muamalat Indonesia	6	6	4	5	5	3
5	Bank Syariah Bukopin	3	4	4	4	4	3
6	Bank Syariah Mandiri	5	5	5	4	4	2
7	Bank Victoria Syariah	3	3	3	3	3	2
8	Bank Central Asia Syariah	3	3	3	3	3	3
9	Bank Negara Indonesia Syariah	3	3	4	4	5	3
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	5	5	5	4	4	4
11	Maybank Syariah Indonesia	3	3	3	3	3	3
12	Bank Panin Dubai Syariah	3	3	3	3	3	3
13	Bank Aceh Syariah	-	-	3	3	3	2
14	Bank NTB Syariah	-	-	-	-	3	3

Sumber : data diolah, 2020

2. Jumlah dewan direksi, merupakan organ perusahaan yang melakukan pengakomodasian atau melaksanakan kegiatan terhadap kepentingan *stakeholders*. Menurut PBI No. 11 / 33 / PBI / 2009, dapat disimpulkan bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan serta mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan, di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Diketahui anggota direksi sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang sesuai pasal 28 PBI No. 11 / 3 / PBI /

[Type here]

2009.

Jumlah dewan direksi BUS di Indonesia tercermin dari tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang jumlah dewan direksi pada 14 BUS di Indonesia.

Dari tabel dibawah dapat diperoleh informasi terkait jumlah dewan direksi cenderung mengalami *fluktuatif* dewan direksi BUS sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah dewan direksi tersebut mempengaruhi ROA BUS. Berikut tabel jumlah dewan direksi BUS tahun 2014 -2019.

Tabel 1.1.3. Jumlah Dewan Direksi BUS Tahun 2014-2019

No	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	5	5	3	3
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	5	5	5	5	5	3
3	Bank Mega Syariah	4	3	3	3	3	2
4	Bank Muamalat Indonesia	5	5	7	6	5	6
5	Bank Syariah Bukopin	4	4	4	4	3	2
6	Bank Syariah Mandiri	5	7	6	7	5	5
7	Bank Victoria Syariah	4	3	4	4	4	4
8	Bank Central Asia Syariah	3	3	3	3	4	4
9	Bank Negara Indonesia Syariah	4	4	4	4	5	4
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	4	5	5	5	4	4
11	Maybank Syariah Indonesia	3	3	4	4	3	3
12	Bank Panin Dubai Syariah	4	6	4	3	3	3
13	Bank Aceh Syariah	-	-	5	4	4	2
14	Bank NTB Syariah	-	-	-	-	4	4

Sumber : data diolah, 2020.

3. Jumlah dewan pengawas syariah (DPS), dimana DPS adalah organ perusahaan mempunyai kaitan dengan usaha atau operasional suatu organisasi berdasarkan syariah Islam. DPS merupakan organ penting dalam BUS yang mempunyai kewenangan dalam menentukan apakah produk maupun jasa telah memenuhi prinsip syariah Islam dan mengawasi

[Type here]

kepatuhan manajemen pemasaran produk ataupun jasa tetap memenuhi ketentuan syariah Islam. Menurut PBI No. 11 /33 / PBI/ 2009 disimpulkan, DPS merupakan dewan yang mempunyai tugas memberikan saran dan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar memenuhi ketentuan syariah Islam. DPS merupakan organ penting perusahaan syariah yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa jasa dan produk yang dikeluarkan ataupun dipasarkan oleh BUS telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut pasal 36 PBI No. 11 /3 / PBI/ 2009 dapat dijelaskan secara singkat mengenai “anggota DPS berjumlah sedikitnya 2 (dua) orang atau sebanyaknya 50% (lima puluh persen) dari banyaknya anggota Direksi”. Jumlah DPS di Indonesia tercermin pada 14 BUS yang ada di Indonesia. Jumlah DPS BUS tercermin dari tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang jumlah DPS pada BUS di Indonesia. Dari tabel dibawah dapat diperoleh informasi bahwa jumlah DPS cenderung stabil walaupun terdapat BUS yang jumlah DPSnya mengalami pengurangan. Dari data tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah DPS mempengaruhi ROA BUS. Berikut tabel jumlah DPS BUS di Indonesia 2014 – 2019 :

Tabel 1.1.4. Jumlah DPS BUS Tahun 2014-2019

NO	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	3	3	3	3	3	3
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2	2	2	2	2	2
3	Bank Mega Syariah	3	3	3	2	2	2
4	Bank Muamalat Indonesia	3	3	3	3	3	1
5	Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	2	2
6	Bank Syariah Mandiri	3	3	3	3	3	1
7	Bank Victoria Syariah	2	2	1	2	2	2

[Type here]

8	Bank Central Asia Syariah	2	2	2	2	2	2
9	Bank Negara Indonesia Syariah	2	2	2	2	2	2
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	2	2	2	2	2	1
11	Maybank Syariah Indonesia	2	2	2	2	2	2
12	Bank Panin Dubai Syariah	2	2	2	2	2	1
13	Bank Aceh Syariah	-	-	2	2	2	1
14	Bank NTB Syariah	-	-	-	-	2	2

Sumber : data diolah, 2020

4. Jumlah komite audit, dimana komite audit adalah komite yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi audit intern untuk pengendalian intern dan tercukupinya pelaporan terhadap laporan keuangan yang dilakukan perusahaan termasuk koordinasi dengan kantor akuntan publik. Merujuk PBI No. 11 /33 / PBI/ 2009 dapat diketahui Komite Audit adalah komite yang bertugas dan bertanggungjawab sedikitnya melakukan evaluasi dari pelaksanaan audit internal untuk memberikan nilai cukup tidaknya pengendalian internal termasuk cukup tidaknya proses dari pelaporan keuangan; dan melaksanakan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk efektivitas pelaksanaan audit eksternal. Jumlah komite audit tercermin dari 14 BUS yang ada di Indonesia. Jumlah komite audit adalah banyaknya atau jumlah komite audit BUS. Jumlah komite audit BUS tercermin dari tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang jumlah komite audit BUS di Indonesia. Dari tabel dibawah, dapat diperoleh informasi terkait jumlah komite audit cenderung berubah-ubah atau tidak stabil. Dari data tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah komite audit tersebut mempengaruhi ROA BUS. Berikut tabel jumlah komite audit BUS di Indonesia tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

[Type here]

Tabel 1.1.5. Jumlah Komite Audit BUS Tahun 2014-2019

NO	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	4	4	5	5
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	4	5	5	4	4	2
3	Bank Mega Syariah	3	3	3	3	3	3
4	Bank Muamalat Indonesia	3	4	4	4	3	3
5	Bank Syariah Bukopin	2	3	3	3	2	3
6	Bank Syariah Mandiri	6	7	6	7	7	4
7	Bank Victoria Syariah	3	3	3	3	4	4
8	Bank Central Asia Syariah	3	3	3	3	3	4
9	Bank Negara Indonesia Syariah	5	4	4	4	3	6
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	4	5	5	5	6	4
11	Maybank Syariah Indonesia	4	3	4	4	4	4
12	Bank Panin Syariah	3	3	2	3	3	3
13	Bank Aceh Syariah	-	-	3	3	3	3
14	Bank NTB Syariah	-	-	-	-	4	4

Sumber : data diolah, 2020

## 1.2. Identifikasi Masalah

Pembahasan dari latar belakang masalah, menggambarkan adanya masalah-masalah muncul yang berkaitan dengan kinerja keuangan BUS, yang permasalahannya memerlukan penerapan GCG seperti jumlah Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Audit dalam pencapaian kinerja keuangan perusahaan.

- 1) Permasalahan kinerja keuangan BUS adalah adanya *return on assets* (ROA) BUS yang cenderung *fluktuatif*/tidak stabil dan nilai yang negatif dari beberapa BUS.
- 2) Permasalahan yang berhubungan dengan jumlah dewan komisaris yaitu jumlah dewan komisaris yang cenderung mengalami perubahan pada beberapa BUS sehingga diperkirakan mempengaruhi ROA BUS yang

[Type here]

cenderung *fluktuatif* atau tidak stabil dan terdapat nilai negatif dari beberapa BUS.

- 3) Permasalahan yang berhubungan dengan jumlah dewan direksi adalah jumlah dewan direksi cenderung mengalami jumlah yang naik dan turun sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah dewan direksi tersebut mempengaruhi ROA BUS.
- 4) Permasalahan yang berhubungan dengan dewan pengawas syariah adalah jumlah dewan pengawas syariah cenderung tidak berubah/stabil sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah dewan pengawas syariah tersebut mempengaruhi ROA BUS.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui batasan masalahnya yaitu variabel bebas adalah mekanisme *good corporate governance* oleh jumlah Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite Audit atas laporan keuangan BUS terhadap pencapaian kinerja dan untuk batasan masalah variabel terikat adalah kinerja keuangan yaitu *profitabilitas* yaitu *Return on Assets (ROA)*.

- 1) Pembatasan variabel penelitian adalah :
  - a. Variabel Bebas : jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit.
  - b. Variabel Terikat : kinerja keuangan yaitu *profitabilitas* berupa ROA.
- 2) Pembatasan objek penelitian: Objek dalam penelitian ini dibatasi hanya pada BUS di Indonesia yang melakukan publikasi laporan keuangan tahunan tahun

[Type here]

2014-2019.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan terkait pembatasan penelitian diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada BUS di Indonesia;
- 2) Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada BUS di Indonesia;
- 3) Apakah jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada BUS di Indonesia;
- 4) Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada BUS di Indonesia;
- 5) Apakah jumlah dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Merujuk dari perumusan masalah sebelumnya, dapat diketahui tujuan dari penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk :

- (1) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia;
- (2) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja

[Type here]

keuangan pada BUS di Indonesia;

- (3) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia;
- (4) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia;
- (5) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada BUS di Indonesia.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian seharusnya memberikan maslahat dan manfaat untuk *stakeholder* dan ataupun pihak tertentu sesuai kepentingannya dan kebutuhan informasi.

- 1) Secara teoritis; Manfaat yang diperoleh yaitu penambahan pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme *good corporate governance* terkait dewan komisaris, direksi, DPS dan komite audit yang berpengaruh pada kinerja keuangan BUS di Indonesia dan menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya;
- 2) Secara praktis; Manfaat yang diperoleh yaitu memberikan pemecahan masalah, pengambilan keputusan praktis dan implementasi tentang mekanisme *good corporate governance* oleh dewan komisaris, direksi, DPS dan jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan BUS di Indonesia yang dilakukan penelitian pada lembaganya dan juga memberikan jalan masuk bagi peneliti lainnya

[Type here]

untuk dapat melakukan penelitian di lembaga tersebut.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. Sulastri & Nurdiansyah (2017; hal 35) menyatakan bahwa kinerja perusahaan merupakan proses dari sebuah kegiatan perusahaan terhadap tolok ukur pada laporan keuangan untuk mendapatkan hasil". Mulyadi (2001) dalam Fadillah (2017; hal 37) menerangkan bahwa "kinerja keuangan adalah keberhasilan yang diperoleh perusahaan dalam kerja dan keuangan".

Sabir dkk (2012; hal 82) menyatakan bahwa "suatu hasil yang diperoleh bank ketika sumber daya dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan adalah kinerja keuangan". Munawir (1986) dalam Krisnaryatko & Kristianti (2019; hal 79) menjelaskan bahwa "suatu hasil yang diperoleh dari analisis rasio keuangan suatu perusahaan untuk digunakan dalam memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan adalah kinerja keuangan". Kusumawardani dkk (2014; hal 3) "suatu gambaran umum mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan analisis melalui alat-alat analisa keuangan, untuk mengetahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan adalah kinerja keuangan".

Farid & Amboningtyas dalam Krisnaryatko & Kristianti (2019; hal 79) menyatakan "analisis terhadap periode tertentu dalam mengukur mengenai

[Type here]

gambaran keadaan keuangan perusahaan yang menggunakan aturan dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan baik dan benar adalah kinerja keuangan”. Pencapaian terhadap performa keuangan merupakan hal yang penting karena dengan performa keuangan yang dilaksanakan dengan baik, perusahaan tentunya mendapatkan hasil dengan baik begitu juga dengan *stakeholder* dan *shareholder*.

Rivai dan Basri (2004) dalam Sulastri & Nurdiansyah (2017; hal 39) menjelaskan bahwa suatu pencapaian yang diperoleh kelompok ataupun seseorang di perusahaan sesuai dengan kewenangan dan bertanggung jawab dalam dalam mencapai tujuan lembaga yang legal, tidak bertentangan dengan moral dan etika dan juga tidak melanggar hukum. Minan (2008) dalam Sari (2014; hal 46) menjelaskan bahwa suatu gambaran mengenai keadaan keuangan bank pada periode tertentu baik yang menyangkut aspek dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana yang diukur melalui indikator *likuiditas*, kecukupan modal dan termasuk *profitabilitas* adalah kinerja keuangan bank”. OJK (2014) dalam Tertius & Christiawan (2015; hal 224) menjelaskan bahwa perlu dilakukan pengembangan yang baik dalam rangka implementasi *good corporate governance* agar suatu perusahaan termasuk lembaga disektor keuangan mempunyai performa keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan melindungi kepentingan pelanggan”.

Dalam penelitian terdahulu oleh Kholid & Bachtiar (2015; hal 127) menyebutkan “peran yang dilakukan dalam mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan perbankan syariah terhadap syariah Islam dilakukan oleh komite

[Type here]

audit dan dewan komisaris merupakan suatu mekanisme dari *good corporate governance* secara tidak langsung”.

#### **2.1.1.1. Rasio – Rasio Kinerja Keuangan**

Variabel terikat pada kesempatan ini adalah kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Karyadi dkk (2018; hal 395) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) dalam suatu kinerja perusahaan yaitu rasio *profitabilitas*, rasio *likuiditas* dan rasio *solvabilitas* untuk mengetahui keadaan perusahaan”. Maith (2013) menjelaskan bahwa “hubungan yang matematis tercipta dengan adanya jumlah yang satu dengan jumlah lainnya adalah rasio”.

Maith (2013; hal 620) menjelaskan bahwa “tingkat *solvabilitas*, *likuiditas*, aktivitas termasuk *profitabilitas* merupakan suatu analisa rasio”. Kemampuan suatu perusahaan ataupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban dengan harta miliknya sebagai jaminan adalah tingkat *solvabilitas*. Kemampuan suatu perusahaan ataupun badan usaha untuk memenuhi hutang jangka pendek dengan harta lancar sebagai jaminannya adalah tingkat *likuiditas*”. Untuk mengukur keefektifan suatu perusahaan ketika menggunakan harta miliknya adalah tingkat aktivitas. Suatu kemampuan badan usaha ataupun perusahaan untuk menghasilkan profit dengan permodalan miliknya”.

Dengan mengetahui rasio – rasio diatas, maka diketahui kondisi perusahaan dalam menghitung ataupun melakukan pengjumlah terhadap

[Type here]

kinerja ataupun performa keuangan badan usaha atau lembaga. Hastuti (2005) dalam Prasinta (2012; hal 2) menjelaskan “terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ataupun performma perusahaan yaitu adanya konsentrasi ataupun tidak terkait pemanipulasian laba, kepemilikan dan dalam mengungkapkan laporan keuangan”.

#### **2.1.1.2. Pengukuran Kinerja Keuangan**

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat diukur kinerja keuangannya. Oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan perusahaan penting untuk dilaksanakan. Prasinta (2012; hal 2) menyebutkan bahwa “berbagai jenis pendekatan rasio dapat dalam mengukur kinerja keuangan antara lain *profitabilitas*, *likuiditas*, rasio pasar, *solvabilitas* termasuk aktivitas”.

Purwaningtyas (2011) dalam Hishamuddin & Tirta (2016; hal 121) menyatakan bahwa “Pengelompokkan dalam mengukur kinerja ada 2 (dua) yakni melalui jumlah finansial dan nonfinansial”. Penggunaan informasi-informasi non finansial merupakan pengjumlah terhadap kinerja nonfinansial seperti kualitas layanan terhadap *customer* dan penggunaan informasi-informasi keuangan untuk pengjumlah kinerja badan usaha ataupun perusahaan adalah menggunakan kinerja finansial seperti laporan neraca dan laporan laba rugi”.

Dwiermayanti (2009) dalam Hartono (2014; hal 193) mengemukakan bahwa “untuk mengetahui mengenai kondisi keuangan suatu badan usaha atau

[Type here]

perusahaan untuk mencerminkan suatu prestasi kinerja periode tertentu dengan melakukan analisis melalui alat-alat analisis keuangan adalah kinerja keuangan badan usaha ataupun perusahaan”.

Hishamuddin & Tirta (2016; hal 121) mengungkapkan “melakukan perbaikan dan kendali atas kegiatan operasional supaya bisa bersaing dengan badan usaha ataupun perusahaan lain merupakan hal dalam mengukur kinerja badan usaha ataupun perusahaan”. Dalam mengukur kinerja ataupun performa perusahaan penting dilaksanakan oleh perusahaan agar dapat mengukur dan mengetahui perubahan tingkat *profitabilitasnya*, mengalami kenaikan atau cenderung turun.

#### **2.1.1.2.1. Profitabilitas**

*Profitabilitas* selalu digunakan ketika mengukur tingkat kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba ataupun profit”. M Hanafi dan A Halim (2007) dalam Purwanto (2019; hal 138) menyebutkan “Suatu cara yang dilakukan perusahaan ataupun badan usaha dalam menilai perusahaan berkemampuan dalam mendapatkan laba pada periode waktu tertentu adalah *profitabilitas*”. Meidyna dan Merta (2020; hal 214) menyebutkan “*profitabilitas* menjadi indikator terpenting yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan membayarkan dividen karena *profitabilitas* menggambarkan laba perusahaan pada periode tertentu”.

Pengukuran tingkat kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan adalah rasio *profitabilitas*. Rasio dimaksud antara lain ROA

[Type here]

dan ROE. Laba yang dihitung sebelum pajak yang dibagikan dengan rata-rata jumlah keseluruhan aset adalah ROA. Sedangkan, laba yang dihitung setelah pajak dibagikan dengan rata-rata equity. Penelitian terhadap kinerja keuangan ini menggunakan alat ukur berupa *profitabilitas* yaitu *Return of Asset (ROA)* hal ini diperoleh dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13 / 30 / DPNP / 2011.

Bastian (2006) dalam Attar dkk (2014; hal 12) menyebutkan “rasio yang dipakai dalam melakukan pengukuran terhadap kemampuan manajemen suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan total aset secara keseluruhan adalah ROA”. Susilatri dkk (2011; hal 421) menyampaikan bahwa “suatu kemampuan badan usaha ataupun perusahaan dalam memperoleh laba disebut *profitabilitas*”. Pengukuran *profitabilitas* dilakukan dengan cara membandingkan jumlah laba dengan jumlah seluruh aktiva”. Nur Mawaddah (2015) dalam Purwanto (2019; hal 138) menyampaikan bahwa “pengukuran rasio *profitabilitas* dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tinggi ataupun rendah profit suatu bank syariah dilakukan ROA”. Hisamuddin & Tirta (2016 ; hal 126) menerangkan tentang “Pengukuran berhasil atau tidaknya manajemen dalam memperoleh laba dilakukan dengan ROA”

“ROA menurut Minan (2008) dalam Nizamullah dkk (2014; hal 45)“ adalah bagaimana manajemen mampu mengubah harta atau aset menjadi *earning*”.

[Type here]

### **2.1.2. Agency Theory (Teori Keagenan)**

*Good corporate governance* muncul karena timbulnya konflik kepentingan dalam mengelola badan usaha atau perusahaan sehingga memunculkan permasalahan keagenan di badan usaha atau perusahaan yang dikenal dengan *agency theory* (teori keagenan)". Jansen & Mackling, (1976) dalam Hartono & Nugrahanti (2014; hal 194) menyatakan bahwa "adanya pemisahan terhadap kepemilikan dengan pelaksanaan pengelolaan badan usaha atau perusahaan menimbulkan problem keagenan atau biasa disebut *agency problem*. Adanya relasi keagenan, manajer selaku pengelola akan diberikan kewenangan oleh pemilik perusahaan dalam mengurus dan mengelola perusahaan baik atas dan untuk pemilik usaha sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan terhadap kepentingan (*conflict interest*) masing-masing.

Dewayanto (2010) dalam Nizamullah dkk (2014; hal 45) menjelaskan bahwa "adanya perjanjian atau kontrak dari pemegang saham terhadap orang lain atau manajer dalam melakukan pekerjaan atas nama dan untuk kepentingan pemilik hal ini dipahami sebagai *agency relationship*". Onasis & Robin (2016; hal 2) menyampaikan bahwa "timbulnya pemisahan kepemilikan dan adanya *conflict interest* antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengelola perusahaan (manajemen) dan merupakan masalah agensi". Hikmah (2013) dalam Kodriyah dkk (2017; hal 59) menyatakan "dalam teori keagenan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan yang memiliki sumber daya secara ekonomis dan manajemen atau agen yang mengelola, menggunakan dan mengendalikan seluruh potensi sumber daya yang ada".

[Type here]

Fitri (2016; hal 164) menjelaskan bahwa “timbulnya asimetri terhadap informasi antara manajer sebagai agen dalam perusahaan menjalankan operasi usahanya dan *stakeholder* atau pemegang saham/pemilik sebagai prinsipal merupakan praktik teori keagenan atau *agency theory*”. Saifi (2019; hal 3) menyebutkan “masalah / konflik keagenan merupakan akibat dari adanya perbedaan kepentingan yang terjadi pada sebuah kontrak kerja yang menimbulkan konflik”. Peneliti lain Lo (2012; hal 2) mengemukakan “bahwa hubungan yang terjadi antara *stakeholder* atau pemegang saham dengan agen atau manajer yang bekerja kepada pemegang saham untuk penggunaan jasanya”. Jensen dan Meckling (1976) dalam Saifi (2019; hal 5) menjelaskan bahwa “untuk memberikan perlindungan kepentingan kepada pemegang saham dari timbulnya konflik kepentingan merupakan hal yang penting untuk menerapkan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan”.

Kerjasama yang baik antara *shareholder* dan *stakeholder* akan meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan modal dan menerapkan *good corporate governance*, seperti yang disampaikan oleh Onasis & Robin (2016; hal 2) “dalam hal modal yang perlu dimaksimalkan dan penerapan mekanisme terhadap pengelolaan badan usaha ataupun perusahaan, perlunya kerjasama yang baik antara pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam membuat keputusan yang baik dan tepat guna meningkatkan nilai perusahaan”. KNKG (2012) dalam Nizamullah dkk (2014; hal 45) menyatakan bahwa “adanya perbedaan kepentingan antara kepentingan yang bersifat ekonomis dalam perusahaan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi

[Type here]

secara pribadi agen/direktur, komisaris dan staf dibawahnya, pemegang saham/*shareholder* atau pihak terkait yang berafiliasi dengan direktur, komisaris atau pemegang saham/*shareholder* yang memungkinkan menimbulkan kerugian bagi bank”.

Hendro & Wardani (2015; hal 42) menjelaskan “fungsi *monitoring*/pengawasan dan *bounding*/pengikatan akan dilakukan melalui kebijakan dari *principal* untuk mengatasi timbulnya masalah keagenan”. Nizamullah dkk (2014; hal 45) menjelaskan “benturan terhadap kepentingan (*conflict of interest*) terjadi dalam hal kepemilikan yang dipisahkan pada institusi perbankan dapat menimbulkan benturan kepentingan jika tidak dilakukan pengawasan”.

### **2.1.3. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Teori – teori dan kajian – kajian mengenai mekanisme *good corporate governance* banyak dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan kajian tata kelola perusahaan. PBI No.11 / 33 / PBI / 2009, terkait dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki kewenangan untuk menentukan pelaksanaan tindak lanjut yang diambil oleh Direksi Bank Syariah atas kesimpulan Dewan Pengawas Syariah.

Prasinta (2012; hal 3) mendefinisikan “Tata kelola perusahaan sebagai kumpulan aturan dan prinsip antara lain keadilan, keterbukaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditor, karyawan dan pemangku

[Type here]

kepentingan lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban salah satu pihak”. Daniri (2005) dalam Febriani dkk (2016; hal 83) menjelaskan bahwa “Tata kelola perusahaan mengatur distribusi tanggung jawab, hak istimewa dan kewajiban mereka yang berkepentingan dalam kelangsungan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajer dan perwakilan non-pemegang saham lainnya”.

Fala (2007) dalam Hani (2012: hal 3) menyatakan “Mekanisme yang mengendalikan perilaku pemegang saham, yang mempengaruhi manajemen dalam mengambil pilihan untuk melakukan penerapan akuntansi yang berprinsip conservatism adalah *Corporate governance*”. Darmadi (2013) dalam Khairiyani (2018; hal 366) menjelaskan “Struktur tata kelola perusahaan bertujuan untuk menjalin hubungan yang menguntungkan antara unsur-unsur yang bertanggung jawab dalam perusahaan (pemegang saham, komisaris dan direksi) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan”.

Wati (2012) dalam Hartono (2014; hal 192) menyebutkan “Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen utama dalam meningkatkan kinerja ekonomi, yang melibatkan berbagai hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.”. Peneliti lain, Sutedi (2012) dalam Khairiyani (2018; hal 365) mendefinisikan “Tata kelola perusahaan adalah mekanisme yang diikuti oleh pemegang saham, komisaris dan direksi untuk meningkatkan umur panjang perusahaan”.

Zarkasyi (2008) dalam Febriani dkk (2016; 83) mendefinisikan “Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada dasarnya adalah suatu struktur (masukan, proses, keluaran) dan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan

[Type here]

antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencapai tujuan organisasi”. KNKG (2012) dalam Nizamullah dkk (2014; hal 44) menyatakan bahwa “Penerapan GCG oleh masing-masing bank dapat berdampak pada sistem perbankan secara keseluruhan untuk menghindari krisis yang mungkin timbul di masa depan.”.

Muawanah (2014) & Octavia (2017) dalam Khairiyani (2018; hal 365) menjelaskan "Tata kelola perusahaan akan menjadi masalah penting untuk masa depan suatu bisnis, seperti cara mengendalikan keberhasilan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau visi jangka panjang suatu perusahaan”. Chapra dan Ahmed (2008) dalam Hisamuddin (2015; hal 116) menyatakan “Dewan Pengawas Syariah perlu dibentuk oleh Bank Umum Syariah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan persyaratan hukum Syariah.”.

Pratiwi dkk (2018; hal 31) menjelaskan bahwa “Struktur tata kelola perusahaan diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan manajer dan pemegang saham atas dasar kepentingan atau preferensi yang berbeda (konflik keagenan)”. La Porta et al. (2000) dalam Hendro & Wardhani (2016; hal 43) mendefinisikan “Tata kelola perusahaan sebagai proses yang memungkinkan investor luar untuk melindungi kepentingan mereka dari pengambilalihan oleh orang dalam atau manajer dalam kasus ini”. Bukhori & Raharja (2012; hal 1) menyebutkan “Tata kelola perusahaan adalah sekumpulan kerangka kerja yang didalamnya kerangka tersebut terdiri dari struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ internal organisasi untuk menangani dan mengatur

[Type here]

operasional perusahaan sedemikian rupa sehingga berfungsi sesuai dengan yang direncanakan”.

Tarigan & Prawithatmi (2017; hal 128) menjelaskan “Pengaturan Tata Kelola dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu Struktur Internal dan Struktur Eksternal. Mekanisme internal, pengelolaan perusahaan dengan struktur dan prosedur internal, seperti rapat pemegang saham, susunan direksi, dewan komisaris. Proses eksternal, regulasi perusahaan dan sistem bisnis”. Hisamuddin (2015; hal 216) menyebutkan “Kehadiran dua pelaku utama dan agen menciptakan masalah dengan proses yang perlu ditempatkan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya, sehingga sistem tata kelola perusahaan muncul”.

#### **2.1.3.1. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. Menurut UU PT Pasal 1 angka 4,5 dan 6, dapat disampaikan “Dewan Komisaris adalah badan hukum yang memiliki peran dan tugas yang sama untuk mengelola dan memberikan pendapat kepada Direksi serta memastikan bahwa organisasi telah mengadopsi tata kelola perusahaan” dan RUPS adalah badan hukum yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasan yang diatur dalam Undang-Undang / atau Anggaran Dasar”.

Kangmartono dkk (2018; hal 106) mendefinisikan “Dewan Komisaris adalah badan hukum yang memiliki peran dan tugas yang sama

[Type here]

untuk mengelola dan memberikan pendapat kepada Direksi serta memastikan bahwa organisasi telah mengadopsi tata kelola perusahaan”. Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi perseroan. Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan sehingga timbul perbedaan pendapat.

Dewan Komisaris memiliki peran penting bagi perusahaan dan pemegang saham. Dewan Komisaris merupakan perpanjangan dari jumlah pemegang saham perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menguraikan fungsi, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki peran yang penting bagi perusahaan dan pemegang saham”.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33 /PBI/2009 menjelaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang mencakup diantaranya :

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan

[Type here]

nasihat kepada Direksi.

Peran khusus yang dimiliki oleh Dewan Komisaris diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk menjadikan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang stabil, mandiri, berdaya saing dengan daya saing dalam bersaing dengan usaha lain. Bukhori dan Raharja (2012; hal 4) menyebutkan “Dengan jumlah anggota Komisaris yang tinggi maka pengawasan terhadap Direksi jauh lebih tinggi, maka masukan atau pilihan yang akan diperlukan Direksi akan jauh lebih besar”. Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menyebutkan “Semakin banyak komisaris, semakin efektif pengawasannya. Akibatnya, pelanggaran yang dapat menurunkan profitabilitas bank dapat dikurangi dengan lebih baik sehingga profitabilitas bank juga dapat meningkat”. Sanda et al. (2005) dalam Wehdawati dkk (2015; hal 211) menerangkan bahwa “jumlah dewan komisaris harus dapat dioptimalkan oleh perusahaan hingga jumlah yang dapat diterima, karena jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan mempengaruhi perusahaan”.

Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) terhadap penelitian yang dilakukannya menyebutkan “jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*”. Bukhori dan Raharja (2012; hal 4) menyatakan “jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan”. Peneliti lain, Kangmartono dkk (2015) menjelaskan bahwa “secara parsial, jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia”. Wehdawati dkk (2015; hal 211) menjelaskan

[Type here]

bahwa “variabel jumlah dewan komisaris yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan”.

### **2.1.3.2. Dewan Direksi**

Dewan Direksi merupakan seseorang yang diberi amanat untuk memimpin dan mengelola perusahaan. Dewan Direksi dapat berupa pemilik perusahaan atau orang yang kompeten yang diangkat oleh pemilik perusahaan untuk mengawasi dan mengelola perusahaan. Nama Dewan Direksi bisa berbeda-beda, seperti dewan gubernur, dewan eksekutif, direksi atau dewan direksi.

Dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33 /PBI/2009, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Direksi memiliki peran penting dalam perusahaan. Dewan

[Type here]

Direksi merupakan pemberi instruksi dan penentu kebijakan bagi sumber daya yang diharapkan sesuai instruksi juga kebijakan tersebut kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pasal 92 UU PT menjelaskan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33 /PBI/2009 menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi diantaranya;

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Bukhori & Raharja (2012; hal 3) menjelaskan “Direksi bertanggung jawab untuk memutuskan arah kebijakan dan strategi permodalan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang”. Faisal (2005) dalam Hartono & Nugrahanti (2014; hal 196) menyatakan “Direksi akan berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi melalui latihan penilaian dan keputusan strategis, serta meminimalkan inefisiensi dan kinerja yang kurang baik”.

Dewan komisaris dan dewan direksi mempunyai tugas yang

[Type here]

penting dan berbeda. Untu (2016; hal 188) menjelaskan bahwa “Badan perusahaan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang diwujudkan oleh Direksi”.

Hartono & Nugrahanti (2014; hal 196) menyatakan bahwa “Dengan jumlah direksi yang terus bertambah, kolaborasi dan operasional antar divisi dalam suatu grup perbankan akan semakin berhasil, yang selanjutnya akan meningkatkan efisiensi perusahaan itu sendiri”. Mengingat perbedaan peran antara Dewan Komisaris dan Direksi, analisis ini memisahkan jumlah Direksi dan jumlah Direksi.

Bukhori & Raharja (2012; hal 4) menyatakan “jumlah dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan”. Wehdawati dkk (2015; hal 212) menjelaskan bahwa “jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE”. Faisal (2005) dalam Hartono & Nugrahanti (2014; hal 196) menyatakan bahwa “jumlah dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan”.

### **2.1.3.3. Dewan Pengawas Syariah**

Setiap BUS wajib memiliki DPS yang merupakan dewan otonom yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, menasihati, mereview dan memantau operasional Bank Syariah guna memberi kepastian mengenai kegiatan Bank Syariah sesuai dengan kepatuhan pada prinsip dan hukum

[Type here]

Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa MUI dan hukum dalam Islam.

Majelis Ulama Indonesia tahun 1999 yang terdiri dari ahli-ahli hukum Islam (*fuqaha*), praktisi dan ekonom mendirikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fungsi dan tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu mencari solusi atas permasalahan terkait operasional lembaga keuangan syariah dan perkembangan ekonomi kerakyatan. Tugas utama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diantaranya meneliti, membahas dan merumuskan cita-cita dan prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam bertransaksi di lembaga keuangan Islam. (Soemitra,2009).

DPS merupakan wakil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada lembaga keuangan syariah. DPS bertugas mengawasi praktik komersial lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum syariah. Dan fungsi utama DPS adalah sebagai organ yang memberikan nasihat dan masukan pada Dewan Direksi, pemimpin kantor unit syariah dan pemimpin unit usaha syariah mengenai sesuatu hal terkait dengan unsur syariah dan merupakan lembaga yang menjadi penengah antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI dalam hal kontak usulan dan rekomendasi layanan dan pembuatan produk dari lembaga keuangan syariah yang membutuhkan fatwa dan studi dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008, menjelaskan mengenai

[Type here]

bagaimana “DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi dan mengawasi jalannya Bank untuk memenuhi Prinsip Syariah; ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PBI”.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 33 /PBI/2009, memberikan penjelasan bahwa DPS bertugas dan mempunyai tanggung jawab antara lain;

1. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan suatu nasihat dan rekomendasi kepada Direksi serta mengawasi/mengelola operasional Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
2. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diantaranya:
  - a. Mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
  - b. Mengawasi tahap pembuatan produk baru Bank;
  - c. Meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional untuk barang baru dari Bank yang belum ada fatwa;
  - d. Melakukan asesmen sesuai dengan prinsip hukum Syariah dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan perbankan;
  - e. Meminta data dan informasi aspek Syariah dari unit kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

[Type here]

Diana (2013) dalam Kodriyah dkk (2017; hal 61) mendefinisikan “DPS adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mereview, mengarahkan, memberi nasihat dan memantau operasional perbankan syariah untuk memastikan bahwa kegiatan Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam syariah dan fatwa Islam”.

PBI No. 11/33/PBI/2009 juga menjelaskan “DPS merupakan Dewan bertanggung jawab untuk memantau/mengawasi operasional perbankan untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum syariah”. DPS mempunyai peran yang strategis dalam kegiatan operasional dan kepatuhan bank syariah Indonesia. Prabowo & Jamal (2017; hal 116), menjelaskan bahwa “Kedudukan dan fungsi DPS pada bank syariah memiliki keterkaitan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah yaitu risiko reputasi yang pada akhirnya memberikan kesan pada risiko lainnya.

Sunandar (2005) dalam Hisamuddin & Tirta (2016; hal 126) menjelaskan bahwa “Dewan Pengawas Syariah merupakan entitas berkewenangan untuk mengawasi / mensupervisi dan melacak secara dekat operasional lembaga keuangan syariah sedemikian rupa sehingga senantiasa menaati kaidah dan prinsip hukum syariah. Dewan Pengawas Syariah ditentukan oleh jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah”.

Dewayanto (2010) dalam Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menyatakan bahwa “Mekanisme pengawasan dan monitoring manajemen suatu institusi semakin baik apabila jumlah dewan semakin besar”. Hal

[Type here]

tersebut dapat dipahami bahwa bertambah banyaknya anggota DPS akan semakin besar pula penguasaan manajemen bank terkait syariah dan *profitabilitas* tidak akan berkurang disebabkan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah.

#### **2.1.3.4. Komite Audit**

Setiap Bank Umum Syariah mempunyai komite-komite dalam membantu tugas dewan komisaris maupun tugas dewan direksi dalam pengawasan maupun pengelolaan perusahaan. Salah satu komite tersebut adalah komite audit. Pasal 42 PBI No. 11 / 33 / PBI/ 2009, menerangkan mengenai komite audit dan tugas serta tanggung jawabnya diantaranya;

- 1) Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab sedikitnya:
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal dalam rangka menentukan kecukupan regulasi internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
  - b. Koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka keberhasilan audit eksternal.
- 2) Terhadap pelaksanaan tugasnya, Komite Audit sedikitnya mengevaluasi terhadap:
  - a. fungsi audit intern dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan / atau saran atas hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, DPS dan / atau auditor eksternal dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris”.

[Type here]

3) Rekomendasi dari Komite Audit mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik ataupun Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Menurut Diana (2013) dalam Kodriyah dkk (2017; hal 61) dijelaskan Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk melakukan audit internal perusahaan. Komite audit akan dinilai berdasarkan partisipasinya di perusahaan. Kerangka *good corporate governance* merupakan tugas dari komite audit untuk memastikan bahwa perusahaan cukup konsisten terkait hukum dan juga peraturan yang ditetapkan yang masih berlaku, bahwa perusahaan menjalankan dan menangani bisnisnya secara etis yang menugaskan komite untuk mengendalikan secara efektif atas benturan kepentingan termasuk *fraud* ataupun kesalahan.

Tjager dkk (2003) dalam Hartono & Nugrahanti (2014; hal 196) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris merupakan dewan yang membentuk Komite Audit sebagai salah satu komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas utama dan bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya transparansi dan keterbukaan dilaksanakan secara tepat dan konsisten oleh para eksekutif<sup>7</sup>.

KNKG (2004) dalam Hartono & Nugrahanti (2014; hal 196) menyebutkan bahwa untuk mendukung terwujudnya *good corporate governance*, komite audit harus dimiliki oleh setiap bank yang tercatat di bursa. Peraturan Bapepam juga mendukung peraturan tersebut yang

[Type here]

menyatakan bahwa dalam suatu perusahaan jumlah minimal komite audit adalah 3 orang.

Rimardhani dkk (2016; hal 169) juga menyatakan Dalam upaya pengendalian, pemegang saham/*shareholder* dan komisaris dengan manajemen juga dihubungkan oleh komite audit. Setidaknya ada satu anggota komisaris independen sebagai ketua komite audit dan dua di luar organisasi sebagai anggota komite audit.

Kodriyah dkk (2017; hal 61) menyatakan bahwa pengukuran komite audit dilakukan dengan menggunakan jumlah indikator komite audit dalam entitas bisnis.

## 2.2. Kajian Penelitian Yang Relevan

Beberapa analisis dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan meneliti pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang bersesuaian dengan tesis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ekasari & Hartomo (2019)	Pengawasan syariah, tata kelola, dan kinerja bank syariah	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap pemeriksaan efek dari dewan pengawas syariah, kinerja dan juga struktur dewan pada perbankan syariah	Penelitian menunjukkan hasil bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan penting dengan kinerja.

[Type here]

2	Eksandy (2018)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah Indonesia	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan secara empiris pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap hasil keuangan perbankan syariah. Output keuangan yang dihitung dengan <i>Return on Assets</i> (ROA) adalah variabel dependen dalam analisis ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang dinilai oleh dewan. Direksi, Komisaris terpilih, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah ini tidak memiliki pengaruh kinerja keuangan. ROA secara bersama-sama dipengaruhi oleh dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit.
3	Hartono dan Nugrahanti (2014)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perbankan	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efek yang positif terhadap kinerja perbankan dimiliki oleh dewan direksi.
4	Kangmartono dkk (2015)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap	Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui kinerja keuangan BPR di Indonesia	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan BPR di Indonesia dipengaruhi positif

[Type here]

		kinerja keuangan	dengan alat ukur jumlah dewan komisaris	secara simultan oleh jumlah dewan komisaris.
5	Mardiyati dan Murdayanti (2016)	Pengaruh jumlah dewan, kepemilikan saham oleh direktur, dan jender terhadap kinerja keuangan perbankan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan bank di Indonesia dipengaruhi oleh struktur tata kelola perusahaan, khususnya jumlah dewan direksi, kepemilikan saham oleh direksi dan jenis kelamin.	Penelitian memberikan hasil bahwa kepemilikan saham direksi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ROA dan Tobin's Q. Sementara itu, tidak ada pengaruh terhadap jumlah direksi dan peran perempuan dalam dewan direksi.
6	Nizamullah Dkk (2014)	Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)	Penelitian ini bertujuan menguji dampak penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang diukur dengan nilai komposit PBI No. 8/4 / PBI / 2006 yang diukur dengan Return on Assets (ROA) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan nasional pada Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini menggunakan sampel 24 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 72 observasi selama periode 2010-2012. Untuk mengevaluasi dampak penerapan GCG yang ditentukan oleh nilai komposit PBI No., pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi linier sederhana. 8/4 / PBI / 2006 sebagai metrik output keuangan independen yang dihitung oleh variabel dependen, Return on Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang diukur dengan nilai komposit PBI No. 8/4 / PBI / 2006 yang

[Type here]

				diukur dengan indeks Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh penting dan negatif terhadap output keuangan Perusahaan. perusahaan perbankan nasional yang go public di Bursa Efek Indonesia.
7	Onasis & Robin (2016)	Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI	Tujuan penelitian adalah untuk menilai pengaruh jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, rapat komite audit, leverage, dan ROA terhadap nilai perusahaan.	Penelitian mendapatkan hasil bahwa jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, rapat komite audit, leverage, dan ROA berpengaruh positif besar terhadap nilai perusahaan.
8	Prasojo, P (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan rasio keuangan dengan proksi CAR, ROA, ROE, BOPO, dan FDR dalam mengukur kinerja keuangan	Hasil penelitian yang melibatkan 258 responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner. 25 bank syariah menjadi jumlah bank yang dijadikan sampel dalam laporan ini. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa berdasarkan CAR, ROA, ROE, dan FDR, GCG memiliki pengaruh positif yang besar terhadap kinerja keuangan.
9	Puspitasari dan Ernawati (2010)	Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kerangka tata kelola perusahaan	Penelitian ini mendapatkan hasil berupa model regresi 7 (model dari regresi yang terakhir). ROA, ROE, PER dan Tobins'Q tidak

[Type here]

		badan usaha	terhadap kinerja keuangan entitas usaha yang tercatat di BEI periode 2005-2007.	memiliki pengaruh besar terhadap komponen tata kelola perusahaan, yaitu proses tata kelola perusahaan internal (kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan).
10	Rimardhani, Dwiatmanto (2016)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap <i>profitabilitas</i> perusahaan (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)	Menganalisis pengaruhnya terhadap <i>profitabilitas</i> perusahaan terhadap struktur tata kelola perusahaan yang baik (studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 2012-2014)	Penelitian menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, direksi dan komite audit memiliki pengaruh yang besar terhadap ROA. Kepemilikan institusional, sebagian, memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap ROA. Ada pengaruh merugikan dan penting dari dewan komisaris independen terhadap ROA. Sementara itu, tidak terdapat pengaruh yang besar terhadap proxy lain untuk proses GCG yaitu direksi dan komite audit.
11	Santoso dkk (2010)	Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan yang diukur dengan jumlah dewan komisaris	Hasil analisis memberi gambaran bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi secara positif oleh dewan komisaris dan dewan direksi
12	Septiputri & Mutmainah (2013)	Dampak <i>corporate governance</i>	Penelitian bertujuan untuk mengetahui	Penelitian memberikan hasil bahwa <i>profitabilitas</i>

[Type here]

		terhadap <i>profitabilitas</i> perbankan syariah Indonesia tahun 2007-2011	peningkatkan <i>profitabilitas</i> yang dipengaruhi oleh dewan pengawas syariah.	dipengaruhi positif oleh jumlah dewan pengawas syariah.
13	Tarigan dan Prawihatmi (2016)	Peran mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia	Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipengaruhi oleh jumlah komisaris, jumlah direksi, jumlah komisaris independen dan jumlah perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan tidak dipengaruhi oleh Jumlah Direksi dan Dewan Komisaris. Sementara itu kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh komisaris independen dan jumlah perusahaan.
14	Tertius dan Christiawan (2015)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan	Bertujuan untuk menganalisis kinerja perusahaan yang dipengaruhi dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial yang merupakan proksi dari faktor <i>good corporate governance</i> .	Hasil penelitian menjelaskan bahwa ROA secara bersama-sama dipengaruhi oleh dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan administratif, dan jumlah organisasi. Kepemilikan dewan direksi dan manajerial sebagian tidak berdampak pada ROA. Sementara itu ROA dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh komisaris independen dan jumlah bisnis
15	Wehdawati dkk (2015)	Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan	Penelitian memberikan hasil bahwa ROA dan ROE dipengaruhi secara negatif signifikan oleh variabel

[Type here]

	an Struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012	terhadap struktur tata kelola perusahaan yang baik (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012)	proporsi dewan komisaris independen Sementara itu ROA dan ROE tidak dipengaruhi oleh variabel jumlah komisaris, jumlah direksi, manajemen, kepemilikan institusional dan jumlah perusahaan.
--	---	--	---

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah logika dalam berargumentasi untuk menemukan solusi sementara atas permasalahan yang dirumuskan. Struktur konseptual penelitian ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka sebagai mekanisme *good corporate governance* pada BUS di Indonesia yaitu jumlah dewan direksi, jumlah dewan direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit yang mempengaruhi kinerja keuangan BUS berupa ROA.

Wikipedia (2008) dalam Hisamuddin & Tirta (2016; hal 126) menjelaskan bahwa “Dewan komisaris adalah badan yang mempunyai tugas mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi atau direksi perseroan terbatas (PT). Kangmartono dkk (2018; hal 106) menyatakan bahwa “pengukuran dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan dilakukan untuk mengukur jumlah dewan komisaris”. Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menyatakan bahwa “Pengawasan akan semakin efektif apabila jumlah dewan komisaris semakin besar”. Wardhani (2006) dalam Hisamuddin & Tirta (2016; hal 126) menjelaskan bahwa “Komisaris independen merupakan salah satu bagian dari banyaknya jumlah dewan komisaris pada sebuah

[Type here]

perusahaan pada periode t". Bukhori dan Raharja (2012) dalam Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menyebutkan "Pengawasan terhadap direksi semakin kuat dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, saran atau pilihan yang akan diterima direksi semakin banyak". Kangmartono dkk (2018; hal 111) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi secara positif signifikan oleh jumlah dewan komisaris. Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menyatakan bahwa "*Profitabilitas* dipengaruhi secara positif oleh jumlah dewan komisaris".

Dewan direksi berperan penting dalam perusahaan sebagai pemberi instruksi bagi karyawan yang diharapkan dengan instruksi tersebut kinerja perusahaan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kangmartono dkk (2018; hal 106) mendefinisikan "Direksi adalah badan perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas operasional perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar mewakili perusahaan baik dalam lingkungan perusahaan. dan di luar pengadilan. Jumlah Dewan Direksi merupakan jumlah direksi suatu perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan tahunan perusahaan".

Tarigan dan Prawihatmi (2016; hal 139) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Jakarta pada periode tahun 2012-2015 tidak dipengaruhi oleh jumlah direksi". Hartono & Nugrahanti (2014; hal ) dalam penelitiannya menyatakan bahwa "kinerja perbankan dipengaruhi dengan efek positif oleh dewan direksi". Peneliti lain,

[Type here]

Septiputri & Mutmainah (2013; hal 2) menyatakan bahwa “*Profitabilitas* dipengaruhi secara positif oleh jumlah dewan direksi”.

DPS adalah sebuah badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap operasional bank supaya sesuai dengan hukum syariah, salah satu argumen Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) yaitu semakin banyak jumlah anggota DPS, maka semakin besar pengaturan pengurus bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga dana yang tidak berdasarkan prinsip syariah tidak digunakan untuk meminimalkan *profitabilitas*”.

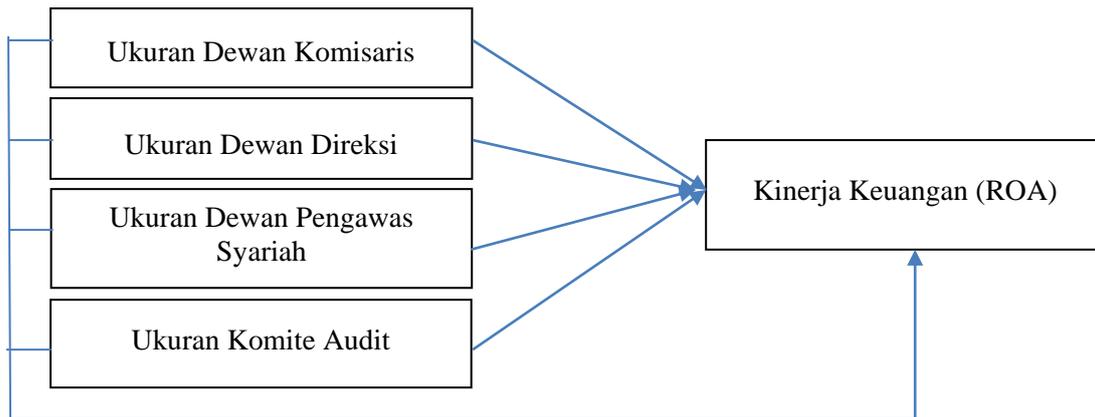
Dewayanto (2010) dalam Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menjelaskan mengenai semakin banyak jumlah dewan, semakin kuat proses pengendalian manajemen perusahaan”. Dalam penelitiannya Septiputri & Mutmainah (2013; hal 3) menerangkan terkait “*profitabilitas* dipengaruhi secara positif oleh jumlah DPS”. Eksandy (2018) menyatakan “Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh DPS”. Peneliti lain, Ekasari & Hartomo (2019) dalam penelitiannya menyebutkan “antara DPS dan kinerja memiliki keterkaitan yang signifikan”.

Penjelasan diatas dan penelitian terdahulu dapat dikemukakan bahwa mekanisme *good corporate governance* dapat berupa jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, DPS dan komite audit yang memiliki pengaruh kepada kinerja keuangan BUS. *Profitabilitas* seperti ROA merupakan salah satu alat dalam mengukur kinerja keuangan. Rasio untuk menghitung kemampuan manajemen dalam menghasilkan *profit* dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki yaitu ROA. Hisamuddin & Tirta (2016; hal 126) menerangkan tentang

[Type here]

“Untuk menghitung kinerja manajemen dalam mendapatkan laba digunakan *Return on Asset (ROA)*. ROA diperoleh dengan cara membandingkan rasio antara laba setelah pajak dengan rasio total aset”.

Kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual

#### 2.4. Hipotesis

Salah satu hal penting dalam sebuah penelitian adalah hipotesis. Gay & Diehl (1992) dalam Siyoto & Sodik (2015; hal 56) menjelaskan “hipotesis atau hipotesa adalah solusi sementara terhadap permasalahan yang bersifat praduga karena kebenarannya masih harus dibuktikan”. Menurut Siyoto & Sodik (2015; hal 15) mendefinisikan “hipotesa adalah kesimpulan atau proposisi tentatif mengenai hubungan diantara dua variabel atau lebih”. Berdasarkan tujuan, kajian teori dan kerangka berpikir, kemudian dirumuskan hipotesis terhadap penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia;
- 2) Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada

[Type here]

Bank Umum Syariah di Indonesia;

- 3) Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia;
- 4) Jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia;
- 5) Jumlah dewan komisaris, jumlah direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan atau metode *kuantitatif* bersifat *asosiatif*. Sugiyono (2017) dalam Meidyna dan Merta (2020; hal 217) “Metode penelitian *kuantitatif* merupakan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian suatu populasi dan sampel tertentu dengan tujuan menganalisis dan menguji suatu hipotesis yang dirumuskan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan”. Sugiyono (2012) dalam Siyoto & Sodik (2015; hal 42) menjelaskan bahwa “Rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih adalah masalah *asosiatif*”.

Penelitian GCG ini menggunakan data sekunder dan sifatnya *time series*. Suatu data yang dikumpulkan melalui institusi ataupun organisasi tertentu yang diperlukan sebagai data penelitian disebut data sekunder. Data ataupun informasi yang didapat ataupun diterima oleh peneliti dari beragam institusi yaitu dari Bank Indonesia, BPS, OJK, Bank Umum Syariah maupun dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, teori-teori, data keuangan perusahaan-perusahaan dan lain-lain merupakan data sekunder.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan tempat penelitian dan juga

waktu penelitian yaitu:

1. Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian merupakan BUS di Indonesia yang menggunakan data empiris dan didapat dari website masing-masing BUS tahun 2014-2019.
2. Waktu penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan desember tahun 2019 hingga minggu ke-2 bulan Nopember tahun 2020.

Tabel 3.2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (Des 2019 – Nov 2020)																
		Des-Jan		Jan-Feb		Feb – Mar		Mar		Mar-Apr	Apr		Apr-Mei		Mei-Juni		Jul-Nov	
		IV - I		II - I		II - I		II	III-IV	V-I	II	III	IV	I	II - V		I	II
1	Penelitian pendahuluan (prariset)	■	■															
2	Penyusunan proposal			■	■													
3	Pembimbingan proposal					■	■											
4	Seminar proposal							■										
5	Penyempurnaan proposal							■	■									
6	Pengumpulan data									■	■							
7	Pengolahan dan analisis data											■	■					
8	Penyusunan laporan penelitian												■	■				
9	Pembimbingan laporan penelitian														■	■		
10	Sidang meja hijau																■	
11	Penyempurnaan laporan penelitian dan penulisan artikel jurnal																	■

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Hal penting yang diperlukan dalam penelitian salah satunya adalah Populasi. Menurut Siyoto & Sodik (2015) “Populasi merupakan bidang generalisasi dari subyek/obyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan

kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang diambil yaitu laporan keuangan BUS di Indonesia.

### 3.3.2. Sampel

Sampel seperti halnya populasi merupakan sesuatu hal dalam sebuah penelitian yang tidak kalah pentingnya dengan populasi. Diambil dari Siyoto & Sodik (2015; hal 64) dijelaskan bahwa “Sampel adalah himpunan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi atau sebagian kecil dari perwakilan populasi yang diambil sesuai protokol tertentu sehingga populasi tersebut dapat direfleksikan”.

Sampel yang diambil dari penelitian GCG ini adalah sampel BUS di Indonesia dan telah melakukan publikasi terhadap *annual report* ataupun laporan atas laporan keuangan tahun 2014-2019. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam pelaksanaan penelitian. Disadur dari Siyoto & Sodik (2015; hal 66) dijelaskan bahwa “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau pemilihan khusus tertentu adalah *purposive sampling*.”.

Suatu penelitian dengan teknik *purposive sampling*, membutuhkan sample yang *representatif* dengan kriteria yaitu:

- 1) Bank Umum Syariah.
- 2) Bank Umum Syariah yang melakukan publikasi terhadap laporan keuangan / *annual report*nya tahun 2014-2019 berikut laporan

GCG didalam laporan keuangan tahunannya / *annual reportnya*.

Dari pilihan data dan kriteria yang disebutkan diatas, sample yang dibutuhkan dan kriteria dipenuhi sebanyak 12 BUS dari tahun 2014-2019 dengan total sampel sebanyak 72 sampel dan yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 2 BUS yaitu Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah. Berikut 12 BUS tersebut:

Tabel 3.3.2. BUS Yang Mempublikasikan Laporan Tahunan 2014-2019

No.	NAMA BANK UMUM SYARIAH	<i>Annual Report (Laporan Tahunan) Publikasi</i>					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Bank Mega Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Bank Muamalat Indonesia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Bank Syariah Bukopin	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Bank Syariah Mandiri	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Bank Victoria Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Bank Central Asia Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Bank Negara Indonesia Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Maybank Syariah Indonesia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Bank Panin Dubai Syariah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : data diolah, 2020.

#### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Defenisi atau pengertian operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam pengertian konsep), lingkup obyek yang diteliti / obyek

penelitian, secara operasional, dalam praktek, dalam pengertian yang nyata. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *independen* (bebas) dan variabel *dependen* (terikat).

Jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ), jumlah dewan direksi ( $X_2$ ), jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) dan jumlah komite audit ( $X_4$ ) merupakan variabel bebas dan kinerja keuangan berupa *Return on Assets* (ROA) ( $Y$ ) merupakan variabel terikat. Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat tabel operasional variabelnya yaitu:

Tabel 3.4. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Instrumen	Skala
1	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	Jumlah Dewan Komisaris ( $X_1$ )	Jumlah/banyaknya Dewan Komisaris	Interval
		Jumlah Dewan Direksi ( $X_2$ )	Jumlah/banyaknya Dewan Direksi	Interval
		Jumlah Dewan Pengawas Syariah ( $X_3$ )	Jumlah/banyaknya Dewan Pengawas Syariah	Interval
		Jumlah Komite Audit ( $X_4$ )	Jumlah/banyaknya Komite Audit	Interval
2	Kinerja Keuangan	<i>Return On Asset</i> (ROA) ( $Y$ )	<i>Annual Report/Laporan Tahunan</i>	Rasio

Variabel – variabel tersebut dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

### 1. Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah komisaris baik internal maupun eksternal dari organisasi sampel adalah jumlah dewan komisaris. Indeks jumlah komisaris di suatu korporasi digunakan untuk menentukan besarnya dewan komisaris. Sesuai PBI nomor 8 / 4 / PBI / 2006 menjelaskan dalam suatu perusahaan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris sedikitnya 3 orang. Namun jumlah anggota dewan komisaris paling banyak sama

dengan dewan . direksi. Variabel bebas adalah jumlah dewan komisaris yang dinyatakan dengan  $X_1$ .

## **2. Jumlah Dewan Direksi**

Direksi ditunjuk untuk menjalankan korporasi secara bersama dan bertanggung jawab atasnya. Jumlah dewan direksi suatu perusahaan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan optimalisasi dalam pembuatan keputusan secara efisien, harian, cepat dan bekerja secara mandiri. Untuk meningkatkan efisiensi perusahaan salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan akan jumlah dewan direksi. Bukti efektivitas tindakan dewan beragam. Dapat dikatakan dari hasil yang masih belum meyakinkan bahwa pengaruh jumlah dewan terhadap kinerja perusahaan sangat tergantung pada karakteristik setiap perusahaan. Kemitraan ini sebagian besar terkait secara finansial dengan karakteristik perusahaan.

Bagi perusahaan yang secara finansial sehat dibandingkan dengan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan, efektivitas manajer dalam menghasilkan kinerja akan berbeda. Dikutip dari PBI nomor 8 / 4 / PBI / 2006 suatu perusahaan memiliki anggota direksi paling kurang berjumlah 3 orang. Variabel bebas adalah jumlah dewan direksi yang dinyatakan dengan  $X_2$ .

## **3. Jumlah Dewan Pengawas Syariah**

DPS merupakan dewan independen yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, berkonsultasi, mengevaluasi dan mengawasi operasional

bank umum syariah untuk memastikan bahwa operasional Bank umum syariah telah sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa dan syariah Islam. DPS harus dimiliki oleh organisasi ataupun perusahaan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip ataupun hukum Islam. Jumlah dewan pengawas syariah merupakan variabel bebas yang dinyatakan dengan  $X_3$ .

#### **4. Jumlah Komite Audit**

Komite Audit adalah sebuah komite/badan yang bertugas membantu komisaris terkait pelaksanaan pengendalian intern, yang ditentukan berdasarkan pengetahuan jumlah anggota komite audit bank. KPMG (2004) dalam Gusnardi (2011; hal 132) menjelaskan “Dengan fokus pada audit internal sebagai sumber utama untuk membantu mereka dalam memastikan konsistensi tata kelola perusahaan. Komite Audit bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya dalam pengendalian internal perusahaan”. Komite audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan berjumlah minimal 3 (tiga) orang dari suatu BUS dan memiliki anggota yang independen minimal 2 (dua) orang. Komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang diketuai oleh komisaris independen BUS dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah komite audit merupakan variabel bebas yang dinyatakan dengan  $X_4$ .

#### **5. Kinerja Keuangan**

Pencapaian kinerja keuangan BUS dapat berupa ROA atau *Return on*

*Assets*, yaitu seberapa besar asset yang digunakan untuk mendapatkan pengembalian berupa laba bagi perusahaan. Kinerja keuangan (ROA) merupakan variabel terikat yang dinyatakan dengan (**Y**). Dikutip dari SEBI No. 13 / 24 / DPNP / 2011, dijelaskan “ROA berupaya menilai kinerja manajemen untuk menghasilkan laba. Rasio semakin kecil menunjukkan kemampuan manajemen bank yang kurang dalam mengendalikan aset untuk meningkatkan pendapatan dan / atau menurunkan biaya”. Nizamullah dkk (2014; hal 43) menjelaskan bahwa “Rasio ini sangat signifikan mengingat manfaat yang diperoleh dengan menggunakan aset akan mencerminkan tingkat kinerja usaha bank. Semakin besar besaran rasio ini, semakin baik atau sehat profitabilitas perusahaan bank tersebut”. Berikut tabel ROA:

Tabel 3.4.4. Peringkat Penilaian ROA

No.	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

SEBI No. 13/30/DPNP/2011 menjelaskan rumus terkait ROA yaitu:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}}$$

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam analisis ini, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Penggunaan data yaitu data yang diperoleh dari Bank Indonesia yang dirilis ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)), Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), dan data sekunder Bank Umum Syariah yang mempublikasikan berupa laporan keuangan tahunan 2014-2019 yaitu BTPN Syariah [www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com), BJB Syariah [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id), Bank Muamalat Indonesia [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), Bank Mega Syariah [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id), Bank Syariah Mandiri [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), Bank Syariah Bukopin [www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id), BNI Syariah [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), BCA Syariah [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id), Bank Victoria Syariah [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id), BRI Syariah [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), Bank Panin Dubai Syariah [www.panindubaisyariah.co.id](http://www.panindubaisyariah.co.id), Maybank Syariah Indonesia [www.maybanksyariah.co.id](http://www.maybanksyariah.co.id), dan lainnya.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari data sekunder dan menggunakan instrumen dalam mengumpulkan data berupa daftar penelusuran dokumen (*document tracing*). Beberapa teknik analisis data, pengujian dan pembahasan dalam analisis ini yaitu (1) Statistik *Deskriptif*; (2) Analisis *Regresi Linier Berganda*; (3) Uji Kualitas Model (Uji Asumsi Klasik); (4) Uji Hipotesis (5) Uji *Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)*.

### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik *deskriptif* adalah analisis data dengan menggunakan statistik. Dikutip dari Siyoto & Sodik (2015; hal 111) menerangkan “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menginterpretasikan data tanpa berusaha menarik asumsi umum atau generalisasi dengan mendeskripsikan atau menjelaskan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya”.

Nizamullah dkk (2014; hal 48) menyebutkan “Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mengetahui sebaran variabel objek penelitian. Analisis deskriptif terdiri dari uraian tentang signifikansi statistik hasil penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi”. Statistik *deskriptif* pada penelitian ini adalah menggambarkan kinerja keuangan BUS di Indonesia 2014-2019 dalam keterkaitannya dengan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit ke dalam penjelasan-penjelasan melalui *interpretasi* data.

### 3.6.2 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan analisis *multipler regression* (*regresi* berganda). Dengan perangkat lunak Solusi Produk dan Layanan Statistik (SPSS) dilakukan perhitungan analisis regresi berganda. Dikutip dari Azuar dkk (2016; hal 11) menjelaskan bahwa “Untuk melakukan olah data statistik yang digunakan dalam penentuan

keputusan terutama dibidang analisis dilakukan dengan *software* SPSS atau *Statistics Product and Service Solutions*". Rumini dan Hascaryo (2015; hal 5.8-26) menjelaskan bahwa "Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk mengestimasi besarnya koefisien yang dihasilkan oleh persamaan linier yang terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas yang akan digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat".

Penelitian ini merupakan analisis kecenderungan hubungan atau keterkaitan variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan analisis statistik.. Rumini dan Hascaryo (2015; hal 5.8-26) menjelaskan bahwa "*Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) adalah perangkat lunak aplikasi yang menggunakan menu dan kotak dialog untuk memberikan kemampuan analisis statistik yang tinggi dan sistem pemrosesan data dalam lingkungan grafis.

Persamaan statistik untuk analisis data penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y (*return on assets*),  $\alpha$  (konstanta),  $\beta$  (koefisien regresi), X1 (jumlah dewan komisaris), X2 (jumlah dewan direksi), X3 (jumlah DPS), X4 (jumlah komite audit).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis ini menggunakan uji asumsi klasik. Menurut Algifari (2000) dalam Fitri (2016; hal 165) menyebutkan "Pemeriksaan gejala varians dari asumsi model klasik dilakukan untuk menentukan apakah model regresi yang menghasilkan estimator linier

tidak bias (*Best Linear Unisex Estimation*) merupakan model regresi yang dihasilkan”.

Tujuan dari uji asumsi ini adalah untuk mengevaluasi estimasi hasil regresi berganda yang dilakukan secara independen terhadap adanya gejala *multikolinearitas*, *autokorelasi* dan *heteroskedastisitas*. Sebagai alat estimasi, uji asumsi klasik harus digunakan sedemikian rupa sehingga jika memenuhi kriteria untuk estimator terbaik linear tidak bias (*blue*), tidak bias yaitu tidak adanya *multikolinieritas*, tidak adanya *heteroskedastitas* dan tidak adanya *autokorelasi*.

Dalam penggunaan uji asumsi klasik terdapat pengujian lainnya yang mendukung pengujian ini antara lain :

**a) Uji Normalitas**

Pengujian yang dilaksanakan dalam rangka mengetahui banyak variabel yang ada apakah berdistribusi normal atau tidak adalah Uji normalitas. Menurut Nizamullah dkk (2014; hal 49) menyatakan bahwa “Uji normalitas mencoba untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat sama-sama berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linier berganda”. Kangmartono dkk (2015; hal 108) menyebutkan “Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak dalam suatu model regresi”.

Menurut Ghozali (2016; hal 154) menyampaikan bahwa “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel perancu atau

residual memiliki distribusi normal dalam model regresi”. Suatu distribusi data yang normal atau mendekati normal merupakan model regresi yang baik. Untuk mengetahui uji normalitas, dilakukan dengan memperhatikan normal *histogram*, *probability plot* dan *Kolmogorov Smirnov*”. Menurut Luthfi dan Santoso (2015; hal 1) “Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data mengikuti asumsi normalitas”. Menurut Ghozali (2016; hal 156) “Normalitas secara teori dapat diamati dengan melihat sebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram residual”. Pengambilan suatu keputusan didasarkan pada :

- a. Jika data menyebar sepanjang garis diagonal dan mengikuti jalur garis diagonal atau pola distribusi normal ditunjukkan oleh grafik histogram, maka asumsi normalitas dipenuhi oleh model regresi.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan / atau tidak mengikuti jalur garis diagonal atau grafik histogram tidak menampilkan pola distribusi normal, maka asumsi normalitas tidak dipenuhi oleh model regresi.

**b) Uji Multikolinieritas**

Tujuan pelaksanaan uji *multikolinieritas* adalah untuk melakukan pengujian terhadap korelasi antar variabel independen yang diamati menggunakan model regresi. Dalam model regresi yang berhasil seharusnya tidak terdapat hubungan antara variabel independen.

Metode yang dilakukan untuk mendeteksi *multikolinearitas* salah satunya adalah *varians inflation factor* (VIF) dan nilai toleransi. Fitri (2016; hal 165) menjelaskan bahwa “terjadinya *multikolinearitas* jika nilai nilai *tolerance*  $\leq 0.1$  dan  $VIF \geq 10$ ”. Kangmartono dkk (2015; hal 108) menyebutkan “Untuk mengevaluasi apakah terdapat *kolinearitas* berganda (korelasi tinggi) antara variabel bebas yang digunakan dalam model maka digunakan uji *multikolinieritas*. Diantara variabel independen seharusnya model regresi yang kuat tidak terjadi”.

c) **Uji *Heteroskedastisitas***

Uji *heteroskedastisitas* adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari suatu residual sebuah observasi ke observasi lainnya didalam suatu model regresi. Apabila varian sisa konstan dari sebuah observasi ke observasi lainnya disebut *homoskedastisitas* dan *heteroskedastisitas* jika berbeda.

Menurut Fitri (2016; hal 165) menyebutkan bahwa “Dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai variabel dependen dan residualnya maka dilakukan pengujian *heteroskedastisitas*. Jika tidak ada tren yang konsisten pada grafik sebar dan seluruh titik tersebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y, sehingga tidak ada bukti adanya *heteroskedastisitas*”.

#### **d) Uji Autokorelasi**

Uji *autokorelasi* adalah suatu pengujian terhadap model *regresi linier* berganda. Fitri (2016; hal 165) menyebutkan bahwa “Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan antara *confounding error* pada periode  $t$  dan *confounding error* pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya) terjadi pada model regresi linier”.

Kangmartono dkk (2015; hal 108) “Uji *auto korelasi* bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara *confounding error* (akibat residual) pada periode  $t$  dan periode  $t-1$  dalam model regresi. Regresi yang bebas dari *autokorelasi* merupakan model regresi yang baik”. *Auto korelasi* dapat terjadi jika ada penyimpangan pada periode  $t-1$  (sebelum) ataupun hubungan antar kelompok pengamatan dalam pada data *time series* yang diurutkan menurut waktu.

#### **3.6.4 Uji Hipotesis**

Penjelasan tentang hubungan antar variabel terikat dan variabel bebas dilakukan dengan uji hipotesis. Menurut Saifi (2019; hal 7) “Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan meregresi masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya”. Kinerja keuangan berupa *Return On Assets* merupakan variabel terikat dalam analisis ini, sementara jumlah dewan komisaris, dewan direksi, DPS dan komite audit merupakan variabel bebasnya”. Bagian dari uji hipotesis pada

analisis ini, yang digunakan yaitu Uji-F (uji signifikansi simultan), Uji-T (uji signifikansi parameter individu) dan uji *Adjusted R<sup>2</sup>* (uji koefisien determinasi).

**a. Uji-T (Uji signifikansi parameter individu)**

Tujuan uji T ini adalah untuk melakukan pengujian signifikansi variabel *dependen* untuk setiap variabel *independen*. Jika tingkat signifikan (p-value) yang didapat angka < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak atau variabel *dependen* secara statistik mempunyai hubungan dengan variabel *independen* dengan  $\alpha=5\%$ . Wehdawati dkk (2015; hal 211) menyebutkan “Uji t dilaksanakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* memiliki pengaruh secara parsial individual terhadap variabel *dependen* dalam model regresi”. Apabila signifikansi  $t < 0,05$  maka bisa disimpulkan bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, maka ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam penelitian. Sementara itu apabila signifikansi  $t > 0,05$  bisa disimpulkan bahwa *good corporate governance* tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Persamaan statistik pada uji t yaitu:

$$t = \beta_n / S\beta_n$$

Keterangan:

t (fungsi t),  $\beta_n$  (koefisien regresi tiap-tiap variabel),  $S\beta_n$  (standard error tiap-tiap variabel)

**b. Uji-F (Uji Signifikansi Simultan)**

Tujuan uji F ini adalah untuk melakukan pengujian secara

substansial pengaruh variabel bebas (jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi dan jumlah DPS dan jumlah komite audit) terhadap variabel terikat (ROA) secara serentak dengan mengevaluasi nilai signifikansi F. Dan bila signifikansi  $F < 0,05$ , dapat disimpulkan hipotesis diterima dan bila signifikansi  $F > 0,05$  maka hipotesis ditolak. Pada prinsipnya, uji statistik F adalah untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap semua variabel terikat yang dirujuk dalam model ini. Rumus statistik uji F yaitu :

$$F = \frac{R^2 / k}{1 - R^2 / (n - k - 1)}$$

Ket:

F(distribusi F), R (variabel penjelas), k&n-k (derajat bebas)

### 3.6.5 Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* ( Uji *Koefisien Determinasi*)

Uji *koefisien determinasi* atau uji *adjusted R<sup>2</sup>* dilaksanakan dalam rangka mengetahui kemampuan variabel bebas untuk menjabarkan variabel terikat. Menurut Erniwatiningsih (2015; hal 6) “Nilai *koefisien determinasi* berupa  $0 < R^2 < 1$ , yang mana nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa varians terbatas dari variabel *dependen* dapat diperjelas oleh variabel *independen*. Sedangkan nilai  $R^2$  mendekati satu berarti atau yang besar variabel *independen* memiliki hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependen*”.

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Ket:

KD (*koefisien determinasi*),  $R^2$  (*koefisien korelasi*)

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Data

Analisis dilaksanakan di Indonesia terhadap Bank Umum Syariah (BUS) yang mengumumkan atau melakukan publikasi laporan keuangannya tahun 2014 - 2019. Data sekunder merupakan data yang digunakan pada penelitian ini. Dari 14 BUS di Indonesia, terdapat 12 BUS yang memenuhi kriteria yaitu yang melaporkan atau mempublikasikan laporan keuangannya tahun 2014-2019. Mekanisme *good corporate governance* dari penelitian ini yaitu indikator jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit. Pengukuran rasio *profitabilitas* menggunakan rasio *return on assets* sebagai variabel *dependen*.

Jumlah sampel yang dapat digunakan pada analisis ini sebanyak 12 sampel BUS berdasarkan metode *purposive sampling*. Periode observasi untuk uji hipotesis adalah tahun 2014-2019, dengan data yang digunakan sebanyak 6 tahun dengan jumlah 72 sampel. Untuk mencapai data yang baik dan benar, maka digunakan kerangka waktu 2014-2019 yang merupakan laporan tahun yang terakhir dalam periode pelaporan laporan keuangan. Berikut tabel deskripsi data objek penelitian :

Tabel 4.1. Deskripsi Data Objek Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1	BUS di Indonesia tahun 2014-2019	14
2	Laporan keuangan BUS di Indonesia yang telah dipublikasikan dan <i>Good Corporate Governance</i> tahun 2014-2019	12

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.2. Deskripsi Data BUS Sebagai Objek Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1	Bank Jabar Banten Syariah	6
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	6
3	Bank Mega Syariah	6
4	Bank Muamalat Indonesia	6
5	Bank Syariah Bukopin	6
6	Bank Syariah Mandiri	6
7	Bank Victoria Syariah	6
8	Bank Central Asia Syariah	6
9	Bank Negara Indonesia Syariah	6
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	6
11	Maybank Syariah Indonesia	6
12	Bank Panin Dubai Syariah	6
	Jumlah Data	72

Sumber: Data diolah, 2020

#### 4.1.1.1. Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris yaitu banyaknya dewan komisaris pada BUS tahun 2014-2019. Sebanyak 12 BUS yang diamati untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan dewan komisaris dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUS. Secara keseluruhan jumlah dewan komisaris berbeda untuk masing – masing tahun pelaporan laporan keuangan BUS tahun 2014-2019. Jumlah dewan komisaris BUS 2014-2019 diukur berdasarkan jumlah orang secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu 43, 45, 44,

43, 44 dan 35 orang.

Banyaknya dewan komisaris tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran dan tanggung jawab dewan komisaris dalam mengawasi, meningkatkan kinerja perseroan, terutama dalam memantau kinerja direksi. Kemampuan dari dewan komisaris untuk melaksanakan tugasnya akan meningkatkan kinerja keuangan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah dewan komisaris berfluktuasi, menunjukkan kinerja yang cukup konsisten dan efektif serta pengawasan yang baik terhadap manajemen perusahaan. Berikut tabel jumlah dewan komisaris :

Tabel 4.3. Deskripsi Data Jumlah Dewan Komisaris 2014-2019

No	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	4	4	4	3
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	3	3	3	4	4	3
3	Bank Mega Syariah	3	3	3	3	3	3
4	Bank Muamalat Indonesia	6	6	4	5	5	3
5	Bank Syariah Bukopin	3	4	4	4	4	3
6	Bank Syariah Mandiri	5	5	5	4	4	2
7	Bank Victoria Syariah	3	3	3	3	3	2
8	Bank Central Asia Syariah	3	3	3	3	3	3
9	Bank Negara Indonesia Syariah	3	3	4	4	5	3
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	5	5	5	4	4	4
11	Maybank Syariah Indonesia	3	3	3	3	3	3
12	Bank Panin Syariah	3	3	3	3	3	3

Sumber : data diolah, 2020

#### 4.1.1.2. Jumlah Dewan Direksi

Jumlah dewan direksi yaitu banyaknya dewan direksi pada BUS tahun 2014-2019. Dewan direksi adalah suatu organ perusahaan yang memiliki peran sentral dalam memajukan dan meningkatkan kinerja perusahaan hingga tetap bisa eksis dan menghasilkan laba yang diharapkan. Dalam mencapai tujuan organisasi, Dewan direksi secara penuh bertanggung jawab terhadap berbagai bentuk operasional dan kepengurusan organisasi. Selain itu juga menjadi tugas direksi untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain diluar perusahaan seperti vendor, pelanggan, pihak legal termasuk regulator. Pada prinsipnya Direksi memiliki hak kendali dalam pengelolaan modal perusahaan dan dana dari investor.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi. Direksi bertugas dan bertanggung jawab diantaranya memberikan laporan pada pemegang saham, mengelola perusahaan serta mengeluarkan kebijakan perusahaan, menyeleksi, menugaskan, melakukan pengawasan terhadap tugas kepala departemen (*manager*) dan karyawan termasuk memberikan persetujuan *budget* tahunan perusahaan.

Sebanyak 12 BUS yang diamati untuk mengetahui jumlah dewan direksi atas kemampuan meningkatkan kinerja keuangan BUS. Secara keseluruhan jumlah dewan direksi berbeda bagi masing –

masing tahun pelaporan laporan keuangan BUS tahun 2014-2019. Jumlah dewan direksi BUS 2014-2019 diukur berdasarkan jumlah orang secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu 49, 52, 51, 50, 44 dan 43 orang. Jumlah dewan direksi berubah-ubah setiap tahunnya, hal ini menjelaskan bahwa dewan direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk perubahan performa perusahaan.

Kemampuan dewan direksi untuk menjalankan tugasnya memberikan harapan untuk peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jumlah dewan direksi yang *berfluktuatif* menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik dan efisien dalam mencapai laba. Berikut tabel jumlah dewan direksi :

Tabel 4.4. Deskripsi Data Jumlah Dewan Direksi 2014-2019

No	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	5	5	3	3
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	5	5	5	5	5	3
3	Bank Mega Syariah	4	3	3	3	3	2
4	Bank Muamalat Indonesia	5	5	7	6	5	6
5	Bank Syariah Bukopin	4	4	4	4	3	2
6	Bank Syariah Mandiri	5	7	6	7	5	5
7	Bank Victoria Syariah	4	3	4	4	4	4
8	Bank Central Asia Syariah	3	3	3	3	4	4
9	Bank Negara Indonesia Syariah	4	4	4	4	5	4
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	4	5	5	5	4	4
11	Maybank Syariah Indonesia	3	3	4	4	3	3
12	Bank Panin Syariah	4	6	4	3	3	3

Sumber : Data Diolah, 2020

#### **4.1.1.3. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

DPS merupakan badan perusahaan yang mengkonsultasikan, menilai, dan mengawasi operasional bank umum syariah untuk memberikan kepastian bahwa operasional / usaha bank umum syariah tersebut sesuai dengan prinsip syariah. sebagaimana ditentukan dalam fatwa syariah dan hukum Islam. Setelah mendapat rekomendasi dari DSN, DPS diangkat dan diberhentikan oleh lembaga keuangan syariah melalui RUPS.

Peran utama DPS adalah melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum Syariah yang dianut oleh Dewan Syariah Nasional. DPS terutama bertanggung jawab untuk berkonsultasi dan memberi nasihat kepada Direksi, Kepala Kantor Cabang Syariah termasuk Kepala Unit Usaha Syariah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Syariah dan merupakan mediator antara Lembaga Keuangan Islam dengan Dewan Syariah Nasional, bertukar saran dan rekomendasi untuk produksi barang dan jasa Syariah.

Jumlah DPS adalah banyaknya dewan pengawas syariah pada BUS tahun 2014-2019. Secara keseluruhan, jumlah dewan pengawas syariah BUS berbeda untuk masing – masing tahun pelaporan laporan keuangan BUS tahun 2014-2019. Jumlah dewan pengawas syariah BUS 2014-2019 diukur berdasarkan jumlah orang secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu 26, 26, 25, 25 dan 21 orang.

Dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan jumlah DPS secara signifikan relatif stabil yang menunjukkan adanya kestabilan dari jumlah DPS. Berikut tabel jumlah DPS :

Tabel 4.5. Deskripsi Data Jumlah Dewan Pengawas Syariah 2014-2019

NO	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	3	3	3	3	3	3
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2	2	2	2	2	2
3	Bank Mega Syariah	3	3	3	2	2	2
4	Bank Muamalat Indonesia	3	3	3	3	3	1
5	Bank Syariah Bukopin	2	2	2	2	2	2
6	Bank Syariah Mandiri	3	3	3	3	3	1
7	Bank Victoria Syariah	2	2	1	2	2	2
8	Bank Central Asia Syariah	2	2	2	2	2	2
9	Bank Negara Indonesia Syariah	2	2	2	2	2	2
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	2	2	2	2	2	1
11	Maybank Syariah Indonesia	2	2	2	2	2	2
12	Bank Panin Syariah	2	2	2	2	2	1

Sumber : Data BUS diolah, 2020

#### 4.1.1.4. Jumlah Komite Audit

Komite audit adalah badan atau komite yang membantu tugas dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian internal. Halla (1999) dalam penelitiannya Gusnardi (2011; hal 133) menyatakan “Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendali aset dan kendali akuntansi terstruktur dengan baik. Komite Audit mempunyai tugas untuk mengarahkan dan menambah pengetahuan bagi

manajemen senior dalam penetapan etika, pengendalian internal dalam lingkungan perusahaan.

Rindove (1999) dalam Gusnardi (2011; hal 133) juga menjelaskan bahwa Komite Audit berperan penting sebagai sistem pengendalian/pemantauan internal untuk memberikan kepastian bahwa tindakan manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham”. DeZoort et.al (2001) dalam Gusnardi (2011; hal 133) menjelaskan bahwa “Tanggung jawab manajemen dalam hal pelaporan keuangan diawasi dengan tanggung jawab Komite Audit. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan auditor dan pengendalian internal, dimana peran Komite Audit terus berkembang saat ini”.

Jumlah komite audit adalah jumlah komite audit pada BUS tahun 2014-2019. Secara keseluruhan, jumlah dewan pengawas syariah BUS berbeda untuk masing – masing tahun pelaporan laporan keuangan BUS tahun 2014-2019. Jumlah komite audit BUS 2014-2019 diukur berdasarkan jumlah orang secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu 44, 47, 46, 47, 47 dan 45 orang.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jumlah komite audit tidak mengalami perubahan secara signifikan yang menunjukkan adanya kestabilan dari jumlah komite audit. Berikut tabel jumlah dewan pengawas syariah :

Tabel 4.6. Deskripsi Data Jumlah Komite Audit BUS 2014-2019

NO	NAMA BANK	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	4	4	4	4	5	5
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	4	5	5	4	4	2
3	Bank Mega Syariah	3	3	3	3	3	3
4	Bank Muamalat Indonesia	3	4	4	4	3	3
5	Bank Syariah Bukopin	2	3	3	3	2	3
6	Bank Syariah Mandiri	6	7	6	7	7	4
7	Bank Victoria Syariah	3	3	3	3	4	4
8	Bank Central Asia Syariah	3	3	3	3	3	4
9	Bank Negara Indonesia Syariah	5	4	4	4	3	6
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	4	5	5	5	6	4
11	Maybank Syariah Indonesia	4	3	4	4	4	4
12	Bank Panin Syariah	3	3	2	3	3	3

Sumber : Data BUS diolah, 2020

#### 4.1.1.5. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan besarnya asset yang dipakai dalam rangka mendapatkan pengembalian berupa laba bagi perusahaan. ROA mempunyai tujuan dalam pengukuran kemampuan ataupun keberhasilan manajemen untuk mendapatkan laba. Rasio ROA yang semakin kecil menggambarkan bahwa kemampuan manajemen yang kurang dalam hal mengoptimalkan atau mengelola aset perusahaan untuk peningkatan laba.

Pentingnya rasio dari ROA menggambarkan bahwa tingkat

efisiensi atas suatu usaha perusahaan berjalan dengan baik tercermin dari laba yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin besar besaran rasio ini, semakin baik atau sehat tingkat pengembalian dari sektor perusahaan. Aset tersebut merupakan total aset suatu usaha yang diperoleh dari modal sendiri ataupun dari modal yang berasal dari luar perusahaan dan sudah menjadi aset suatu perusahaan yang digunakan bagi keberlangsungan operasi perusahaan.

ROA BUS adalah rasio ROA yang diperoleh atas kinerja BUS tahun 2014-2019. Secara keseluruhan, ROA BUS secara mayoritas berbeda untuk setiap tahun pelaporan laporan keuangan BUS tahun 2014-2019. ROA BUS 2014-2019 diukur berdasarkan persentase (%) secara berurutan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yaitu 0,80%, 0,49%, 0,63%, 0,63%, 1,28% dan 1,73%. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ROA BUS terjadi kenaikan terhitung mulai tahun 2015 – 2019, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari kinerja BUS. Berikut tabel ROA BUS tahun 2014-2019:

Tabel 4.7. Deskripsi Data *Return On Assets* 2014-2019

No.	NAMA BANK	<i>Return On Assets</i>					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Jabar Banten Syariah	0.72%	0.25%	-8.09%	-5.69%	0.54%	0.60%
2	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	4.23%	5.20%	9.00%	11.20%	12.40%	13.60%
3	Bank Mega Syariah	0.29%	0.30%	2.63%	1.56%	0.93%	0.89%
4	Bank Muamalat Indonesia	0.17%	0.13%	0.14%	0.04%	0.08%	0.05%
5	Bank Syariah Bukopin	0.27%	0.79%	-1.12%	0.02%	0.02%	0.04%
6	Bank Syariah	-0.04%	0.56%	0.59%	0.59%	0.88%	1.69%

	Mandiri						
7	Bank Victoria Syariah	-1.87%	-2.36%	-2.19%	0.36%	0.32%	0.05%
8	Bank Central Asia Syariah	0.80%	1.00%	1.10%	1.20%	1.20%	1.20%
9	Bank Negara Indonesia Syariah	1.27%	1.43%	1.44%	1.31%	1.42%	1.82%
10	Bank Rakyat Indonesia Syariah	0.08%	0.77%	0.95%	0.51%	0.43%	0.31%
11	Maybank Syariah Indonesia	3.61%	-20.13%	-9.51%	5.50%	-6.86%	11.15%
12	Bank Panin Syariah	1.99%	1.14%	0.37%	-10.77%	0.26%	0.25%

#### 4.1.2. Hasil Uji Persyaratan Analisis

Dari variabel – variabel diatas dapat dijelaskan terkait deskripsi data statistik variabel masing – masing. Deskriptif data statistik mempunyai tujuan untuk menggambarkan data – data variabel dari penelitian yang dilakukan, diantaranya nilai minimum, maksimum, *mean* dan *std deviation* terhadap 72 sampel yang diteliti. Berikut tabel tersebut:

Tabel 4.8. Deskripsi Statistik Data Penelitian

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DEKOM	72	2.0000	6.0000	3.569444	.8529384
DIREKSI	72	2.0000	7.0000	4.138889	1.1044794
DPS	72	1.0000	3.0000	2.194444	.5474368
KOMAUDIT	72	2.0000	7.0000	3.833333	1.1506275
ROA	72	-20.1300	13.6000	.625139	4.6675270
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data BUS diolah, 2020

Dari tabel 4.7. dapat dipahami nilai jumlah dewan komisaris berada diantara 2 dan 6, rata – rata (mean ) dengan nilai 3,57 dan standard deviasinya

0,8529. Jumlah dewan direksi berada diantara 2 dan 7, rata – rata (mean ) dengan nilai 4,14 dan standard deviation 1,1045. Jumlah dewan pengawas syariah berada diantara 1 dan 3, rata – rata (mean ) dengan nilai 2,19 dan standar deviation 0,5474, Jumlah komite audit berada diantara 2 dan 7, rata – rata (mean) dengan nilai 3,83 dan standard deviation 1,1506 dan *Return On Asset* (ROA) berada diantara -20,13 dan 13,60, rata – rata (mean ) dengan nilai 0,63 dan standard deviation 4,6675.

Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis yang menyebutkan nilai variabel standar deviasi < nilai rata-rata (mean) jumlah dewan komisaris, jumlah direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit, menunjukkan hasil yang baik. Ini karena deviasi standar mewakili deviasi nilai yang lebih rendah dari rata-rata dari data variabel. Sementara *Return On Asset* nilai *standard deviation* lebih besar daripada mean atau rata-rata, mencerminkan kurang baiknya hasil tersebut.

#### **4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik**

Untuk mengevaluasi efek perkiraan regresi linier berganda yang dilakukan secara independen dari uji *multikolinearitas*, *autokorelasi* dan *heteroskedastisitas*, maka dilakukan uji asumsi klasik. Untuk menentukan apakah pengujian tersebut memenuhi kriteria penduga best *linear unbiased estimator (blue)*, maka uji ini dapat sebagai metode estimasi yaitu tidak adanya *multikolinearitas*, tidak adanya *heteroskedastisitas*, dan tidak adanya *autokorelasi*. Dalam uji

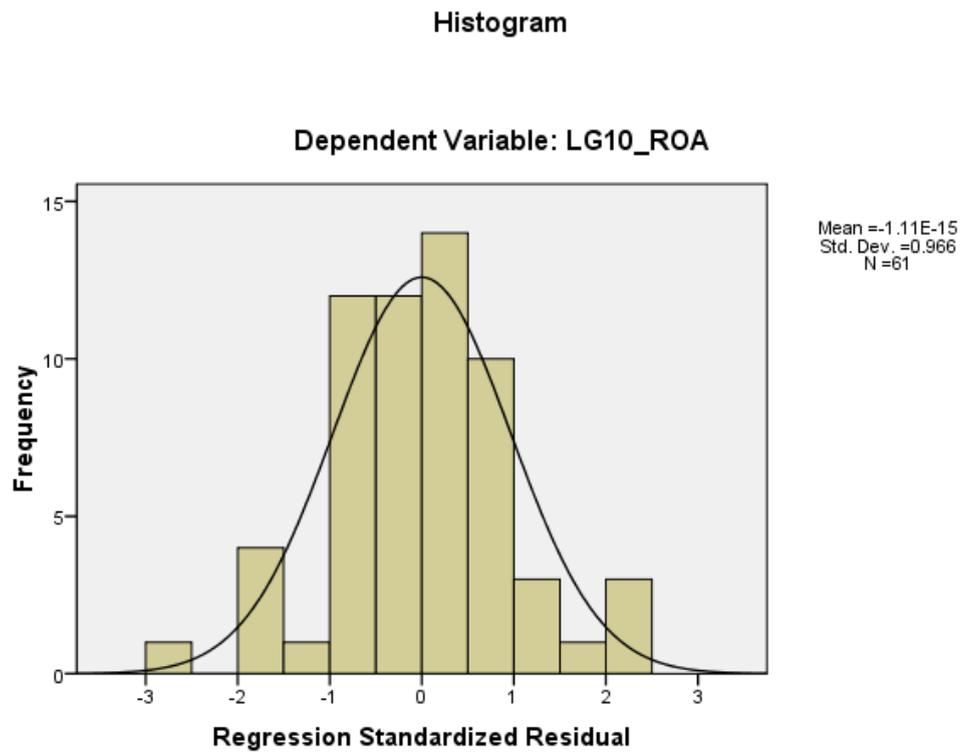
ini, didukung oleh pengujian lainnya yaitu uji normalitas; *multikolinieritas*; *heteroskedastisitas* dan *autokorelasi*.

#### **4.1.2.1.1. Uji Normalitas**

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini memakai pengujian berdistribusi normal dengan ciri-ciri model regresi yang berdistribusi normal ataupun mendekati normal. Pengujian normalitas dapat diketahui dengan membandingkan sebaran kumulatif data riil dengan sebaran kumulatif data yang biasanya terdistribusi dengan melihat peta probabilitas biasa. Distribusi dikatakan normal apabila suatu *ploting* data menggambarkan bentuk satu garis lurus diagonal.

Pada analisis ini, dilakukan uji normalitas berupa uji *probability plot*, *histogram* termasuk *kolmogorov smirnov*. Dari pengujian normalitas dengan menggunakan diagram menunjukkan hasil yang belum meyakinkan bahwa hasil uji tersebut berdistribusi normal yang selanjutnya dilakukan transformasi residual yang menghasilkan uji normalitas histogram berdistribusi dengan normal. Hasil pengujian dilakukan dengan SPSS diperoleh hasil yaitu :

Gambar 4.9. Hasil Program SPSS Grafik Histogram

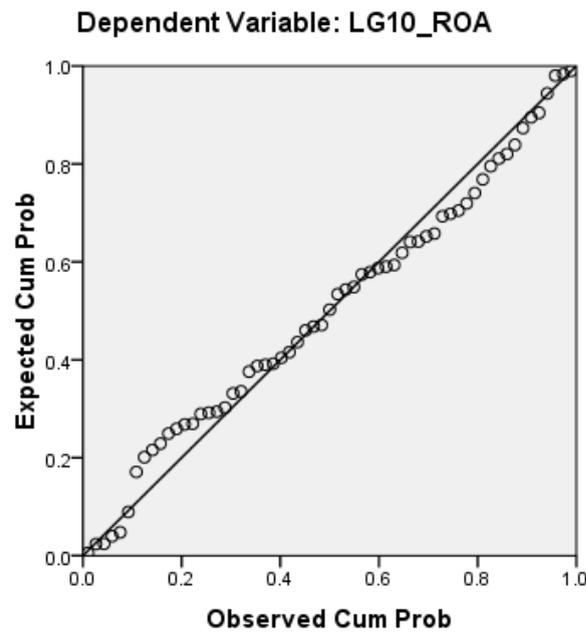


Sumber : Data BUS Diolah, 2020

Gambar histogram tersebut diatas dapat dipahami yaitu pola grafik tertentu yang dibentuk dari hasil titik-titik dan datanya yang tersebar membentuk grafik dengan titik tertinggi pada garis vertikal nol. Dari pengujian ini menunjukkan hasil bahwa data telah normal dan pengujian lebih lanjut dapat dilanjutkan.

Gambar 4.10. Hasil SPSS Normal *Probability* Plot

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data BUS diolah. 2020

Gambar 4.9. Normal *Probability* Plot yang telah dilakukan transformasi residual terhadap variabel *independen* dan variabel *dependen* yang menunjukkan bahwa data yang terdistribusi terlihat mendekati garis distribusi normal, sebaran data tidak melenceng ke kiri atau kanan, hal ini mempunyai arti bahwa data memiliki pola seperti distribusi normal, artinya dapat diterima jika menggunakan data tersebut sebagai bahan kajian/penelitian.

Tabel 4.11. Hasil SPSS Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.61927055
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.061
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.611
Asymp. Sig. (2-tailed)		.850

Sumber : data BUS diolah, 2020.

Tabel tersebut diatas, menjelaskan tentang pengujian *kolmogorov smirnov*, data residual yang ditransformasi residual menghasilkan perubahan jumlah (n) yang sebelumnya n = 72 menjadi n = 61, hal ini menunjukkan bahwa terdapat data yang harus disesuaikan atau *outlier* pada data residual tersebut. Pada variabel bebas (jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit) dilakukan transformasi data menggunakan *moderate positive skewness* dengan bentuk transformasi SQRT yang kecondongan grafik histogramnya mendekati garis x dan variabel terikatnya (*Return on Asset/ROA*), data dilakukan transformasi menggunakan bentuk tranformasi berupa *moderate negative skewness* dengan transformasi LG10 yang kecondongan grafik histogramnya lebih berat ke kanan dari sumbu 0. Setelah dilakukan transformasi residual diperoleh hasil

yang menunjukkan bahwa Kolmogorov smirnov mempunyai nilai 0,611 yang tidak signifikan dengan 0,05. Sementara signifikansinya bernilai  $0,850 > 0,05$ , yang berarti hasil residualnya berdistribusi normal. Dari pengujian ini memberikan hasil bahwa data telah normal sehingga pengujian lebih lanjut dapat dilanjutkan.

#### 4.1.2.1.2 Uji *Multikolinieritas*

Pengujian ini mempunyai tujuan untuk menemukan apakah ada korelasi antar variabel *independen* dalam model *regresi*. Tidak terjadinya korelasi di antara variabel bebas merupakan model *regresi* yang baik. Fauzi (2016; hal 51) menjelaskan “Salah satu metode untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat faktor inflasi varians (VIF) dan nilai tolerans.”.

Fitri (2016; hal 165) menjelaskan bahwa “*Multikolinieritas* terjadi ketika nilai  $VIF \geq 10$  dan nilai toleransi  $\leq 0,1$ ”. Kangmartono dkk (2015; hal 108) menyebutkan “Untuk mengevaluasi apakah terdapat kolinieritas berganda (korelasi tinggi) antara variabel bebas yang digunakan dalam model maka digunakan uji *multikolinieritas*”. Berikut tabel pengujian *multikolinieritas* :



Tabel 4.12. Uji *Multikolonieritas*Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.541	.815		.664	.510		
	SQRT_DEKOM	-.986	.451	-.332	-2.186	.033	.662	1.510
	SQRT_DIREKSI	-.072	.371	-.030	-.195	.846	.645	1.551
	SQRT_DPS	-.086	.798	-.015	-.108	.915	.792	1.263
	SQRT_KOMAUDIT	.673	.329	.294	2.046	.045	.738	1.355

a. Dependent Variable: LG10\_ROA

Sumber : Data BUS diolah, 2020

Dari tabel uji *multikolonieritas* di atas, dapat dipahami bahwa nilai toleransi dari hasil perhitungan memperlihatkan tidak terdapat variabel bebas yang mempunyai nilai *tolerance* < 0,10 diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas dan variabel terbebas dari unsur pengganggu dalam pengujiannya.

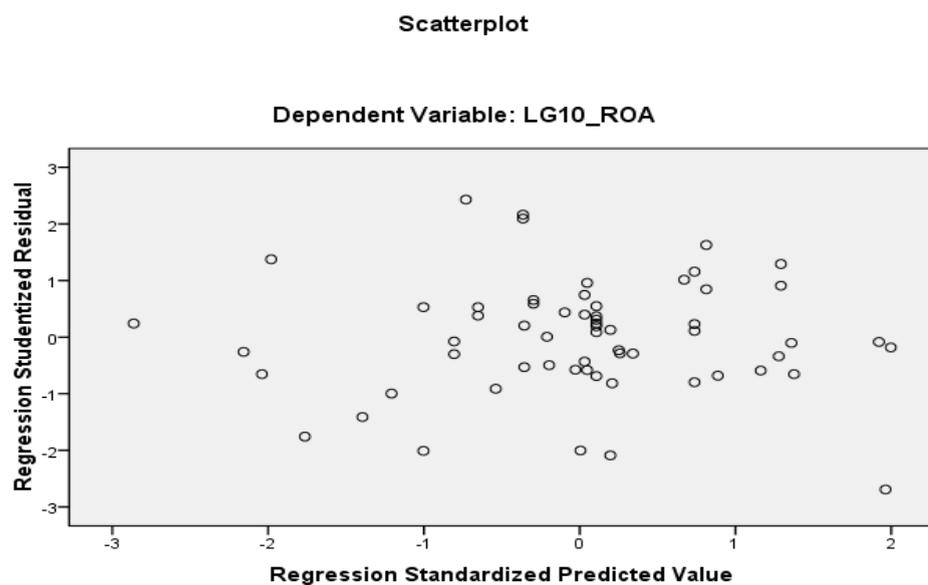
Hasil VIF untuk variabel penelitian jumlah dewan komisaris yaitu sebesar 1,510, variabel jumlah dewan direksi dengan VIF senilai 1,551, variabel penelitian jumlah dewan pengawas syariah yaitu sebesar 1,263, variabel penelitian jumlah komite audit yaitu sebesar 1,355 yang berarti nilai VIF < 10, Hal tersebut menggambarkan bahwa model regresi tidak memiliki multikolinieritas, sehingga datanya dianggap baik dan dapat dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut.

#### 4.1.2.1.3 Uji *Heteroskedastisitas*

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada ketidaksamaan varians dari residual observasi yang satu ke observasi yang lain. Apabila varian sisa konstan dari observasi yang satu ke observasi yang lain disebut *homoskedastisitas* dan disebut *heteroskedastisitas* jika berbeda.

Menurut Fitri (2016; hal 165) menyebutkan bahwa “Dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai variabel *dependen* dan residualnya maka dilakukan pengujian *heteroskedastisitas*. Tidak ada bukti *heteroskedastisitas* jika seluruh titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y dan sebaran data tidak menunjukkan pola yang jelas”. Berikut tabel pengujian tersebut:

Gambar 4.13. Hasil Uji *Heteroskedastisitas*



Sumber : data BUS diolah, 2020

Dari gambar *scatterplot* diatas, dapat diketahui variabel-variabel dalam analisis ini mendapatkan hasil uji *heteroskedastisitas* yang menyatakan bahwa variabel penelitian yang digunakan tidak memiliki *heteroskedastisitas*. Karena seluruh titik tersebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat pola jelas.

#### **4.1.2.1.4. Uji Autokorelasi**

Suatu pengujian terhadap model *regresi linier* berganda disebut uji *autokorelasi*. Fitri (2016; hal 165) menjelaskan “Untuk menguji apakah hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya) terjadi pada model regresi linier digunakan uji *autokorelasi*”. Kangmartono dkk (2015; hal 108) menjelaskan “Regresi yang bebas dari *autokorelasi* merupakan model regresi yang baik. *Autokorelasi* bisa terjadi jika terjadi deviasi terhadap periode  $t-1$  (sebelumnya) ataupun jika terdapat hubungan antara kelompok penelitian dari data *time series* yang diurutkan berdasarkan waktu”. Pengujian menggunakan uji DW Test atau *Durbin-Watson* dilaksanakan agar mendapatkan hasil apakah terdapat *autokorelasi* atau tidak. Berikut pengujian Durbin Watson :

Tabel 4.14. Uji Durbin Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.797

a. Predictors: (Constant), SQRT\_KOMAUDIT, SQRT\_DPS, SQRT\_DEKOM, SQRT\_DIREKSI

b. Dependent Variable: LG10\_ROA

Sumber : data BUS diolah, 2020

Dari tabel diatas, dilakukan perbandingan nilai Durbin Watson terhadap nilai dari tabel Durbin Watson untuk mengetahui apakah *autokorelasi* ada atau tidak pada pengujian tersebut. Pada uji DW ini, nilai signifikansi yang dipergunakan sebesar 5% dengan sampel berjumlah  $n = 72$  dan variabel bebas sebanyak  $k = 4$ , maka dapat ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa DW bernilai 1,797. Jumlah  $n = 72$ , variabel bebas senilai  $k = 4$ , diketahui  $dL$  bernilai sebesar 1,503 dan  $dU$  bernilai sebesar 1,737. Diketahui rumusan untuk menentukan nilai DW adalah  $dU < DW < 4-dU$ . Dari hasil SPSS diketahui DW bernilai sebesar  $1,737 < 1,797 < 2,194$ , hasil ini memberikan makna bahwa pada pengujian yang dilakukan ini tidak ada *autokorelasi*.

#### 4.1.1.2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang dipergunakan pada observasi ini. Penelitian ini dilakukan dengan analisis yang mempergunakan instrumen statistik untuk menggambarkan kecenderungan hubungan antar variabel. Regresi

berganda dipergunakan untuk menilai hubungan antara pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance yang terdiri dari Dewan Komisaris (X1), Direksi (X2), Dewan Pengawas Syariah (X3) dan Komite Audit (X4) terhadap Return On Assets (Y) dimana pengaruhnya dilakukan pengukuran menggunakan bantuan software SPSS:

Tabel 4.15. Hasil Output Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.541	.815		.664	.510
	SQRT_DEKOM	-.986	.451	-.332	-2.186	.033
	SQRT_DIREKSI	-.072	.371	-.030	-.195	.846
	SQRT_DPS	-.086	.798	-.015	-.108	.915
	SQRT_KOMAUDIT	.673	.329	.294	2.046	.045

a. Dependent Variable: LG10\_ROA

diolah, 2020

Dari tabel diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,541 - 0,986 X_1 - 0,072 X_2 - 0,086 X_3 + 0,673 X_4 + e$$

Regresi dengan persamaan diatas, digambarkan dengan hasil

yaitu :

1. Persamaan regresi berganda tersebut menggambarkan kondisi jika jumlah dewan komisaris (X<sub>1</sub>), jumlah dewan direksi (X<sub>2</sub>), jumlah DPS (X<sub>3</sub>) dan jumlah komite audit (X<sub>4</sub>) bernilai konstant, sehingga menghasilkan *Return On Assets* senilai 0,541.

2. Persamaan regresi berganda tersebut menggambarkan bahwa jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ) bernilai -0.986, maka akan memberikan pengertian yaitu jika jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ) bertambah 1 orang yang berarti akan memberikan dampak menurunnya *Return On Assets* (Y) senilai 0.986 satuan.
3. Persamaan regresi berganda tersebut menggambarkan jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) bernilai 0.072, maka akan memberikan pengertian yaitu jika jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) bertambah 1 orang yang berarti akan memberikan dampak menurunnya *Return On Assets* (Y) senilai 0.072 satuan.
4. Persamaan regresi berganda tersebut menggambarkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) bernilai -0.086, maka akan memberikan pengertian yaitu jika jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) bertambah 1 orang yang berarti akan memberikan dampak menurunnya *Return On Assets* (Y) senilai 0.086 satuan.
5. Persamaan regresi berganda tersebut menggambarkan bahwa jumlah komite audit ( $X_4$ ) bernilai 0.673, nilai ini memberikan pengertian bahwa apabila jumlah komite audit ( $X_4$ ) bertambah 1 orang yang berarti akan memberikan dampak meningkatnya *Return On Assets* (Y) senilai 0.673 satuan.

#### 4.1.3. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

Dalam analisis ini, Variabel bebasnya adalah jumlah dewan komisaris, jumlah direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit, sementara variabel terikatnya adalah *Return On Assets* (ROA) yang merupakan proksi dari kinerja keuangan. Uji hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

#### 4.1.3.1. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji T)

Tujuan Uji T adalah untuk melakukan pengujian terhadap variabel terikat dari tiap-tiap variabel bebas secara signifikan. Uji ini dilakukan secara satu persatu atau uji parsial dan hasil perhitungannya menggunakan alat bantu program SPSS. Dari tabel 4.14. diketahui nilai  $t_{hitung}$  dari variabel jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ) sebesar -2,186 dengan nilai signifikan 0,033. Yang kemudian dibandingkan t tabel berjumlah  $n = 72$ ,  $\alpha = 0,05$ , nilai  $dk = n - 4$  didapat dari t tabel bernilai 1,996 (-2,186 < 1,996) dan nilai signifikansi sebesar  $0,033 < 0,05$ . Dari hasil yang disajikan tersebut  $H_0$  ditolak artinya jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (Y).

Seterusnya, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) bernilai -0,195, signifikan bernilai  $0,846 > 0,05$ . Yang kemudian dibandingkan t tabel yang berjumlah  $n = 72$ ,  $\alpha = 0,05$ , nilai  $dk = n - 4$  didapat dari t tabel dengan nilai 1,996 (-0,195 < 1,996). Dari hasil yang disajikan tersebut, maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak ada pengaruh dari jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) terhadap *Return On Assets*(Y).

Selanjutnya, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) bernilai -0,108, signifikan bernilai  $0,915 > 0,05$ .

Kemudian dibandingkan t tabel yang berjumlah  $n = 72$ ,  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = n - 4$  didapat dari t tabel bernilai 1,996 ( $-0,195 < 1,996$ ). Dari hasil yang disajikan tersebut  $H_0$  diterima yang artinya tidak ada pengaruh dari jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) terhadap *Return On Assets* (Y).

Kemudian, diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel jumlah komite audit ( $X_4$ ) bernilai 2,046, signifikan bernilai 0,045 yang berarti nilai signifikansi sebesar  $0,045 < 0,05$  dan kemudian dibandingkan t tabel berjumlah  $n = 72$ ,  $\alpha = 0,05$ ,  $dk = n - 4$  didapat dari t tabel bernilai 1,995 ( $2,046 < 1,995$ ). Dari hasil yang disajikan tersebut maka  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh dari jumlah komite audit ( $X_4$ ) terhadap *Return On Assets* (Y).

#### 4.1.3.2. Uji signifikansi simultan (Uji F)

Tujuan Uji F adalah untuk melakukan pengujian secara signifikan terhadap variabel terikat (kinerja keuangan berupa ROA) dari pengaruh variabel bebas (jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah DPS dan jumlah komite audit) secara bersama-sama atau simultan untuk mengetahui nilai signifikan F.

Tabel 4.16. Hasil Output Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.917	4	.979	2.383	.062 <sup>a</sup>
	Residual	23.010	56	.411		
	Total	26.926	60			

a. Predictors: (Constant), SQRT\_KOMAUDIT, SQRT\_DPS, SQRT\_DEKOM, SQRT\_DIREKSI

b. Dependent Variable: LG10\_ROA

Dari tabel diatas, diketahui nilai  $F_{hitung} = 2,383$ , sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $n = 72$  dan  $df = n - 4$  diperoleh nilai  $F_{tabel} 2,51$  sehingga didapatkan  $F_{hitung} < F_{tabel} (2,383 < 2,51)$  dan signifikansi  $0,062 > \alpha = 0,05$  sehingga diketahui  $H_0$  diterima atau dapat disimpulkan  $H_a$  ditolak yang artinya bahwa variabel jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ), jumlah dewan direksi ( $X_2$ ), jumlah DPS ( $X_3$ ) dan jumlah komite audit ( $X_4$ ) secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019.

#### **4.1.3.3. Uji Koefisien *Determinasi* (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas berupa jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit terhadap variabel terikat yakni *Return On Assets* (ROA). Apabila variabel terikat dapat menginformasikan semua yang dibutuhkan untuk melakukan prediksi terhadap variasi variabel bebas berarti mempunyai nilai  $R^2$  mendekati satu. Hasil uji *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.17. Hasil Output Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.381 <sup>a</sup>	.145	.084	.64101

a. Predictors: (Constant), SQRT\_KOMAUDIT, SQRT\_DPS, SQRT\_DEKOM, SQRT\_DIREKSI

b. Dependent Variable: LG10\_ROA

Merujuk hasil uji determinasi diatas maka  $R^2$  bernilai sebesar 0.145, dalam persentase sebesar 14,5%, artinya koefisien determinasi ( $R^2$ ) bernilai diantara  $0 < R^2 < 1$ , hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas berupa jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ), jumlah dewan direksi ( $X_2$ ), jumlah DPS ( $X_3$ ) dan jumlah komite audit ( $X_4$ ) berpengaruh sebesar 14,5% terhadap variabel terikat yaitu ROA (Y) Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2019 dan faktor lain yang mempengaruhi sebesar 85,5 %.

## 4.2. Pembahasan

Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berupa ROA dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 4.2.1. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian ini, Hasil uji t ditunjukkan dengan  $t_{hitung}$  jumlah dewan komisaris ( $X_1$ )  $< t_{tabel}$  ( $-2,186 < 1,996$ ), signifikan bernilai

$0,033 < 0,05$ . Dari hasil yang disajikan tersebut maka  $H_0$  ditolak yang berarti jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ) berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan berupa ROA ( $Y$ ). Hasil penelitian ini menerangkan bahwa jumlah dewan komisaris yang semakin besar memberikan pengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan BUS. Merujuk peraturan Bank Indonesia, jumlah dewan komisaris sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah direksi.

Dari penelitian ini, dapat disampaikan bahwa pengaruh jumlah dewan komisaris yang negatif terhadap kinerja keuangan memberikan efek yang kurang sinergi dengan bertambahnya dewan komisaris hal ini dapat diduga disebabkan oleh kondisi makro ekonomi pada saat penelitian (tahun 2014-2019) tidak sedang dalam kondisi yang normal seperti adanya defisit anggaran, adanya *tax amnesty*, adanya perang dagang, ketidakpastian atau susahannya memprediksi arah gerak ekonomi global yang kemungkinan memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan.

Selanjutnya faktor lain diluar penelitian ini yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah minimnya kerjasama antara regulator dan pemerintah dalam pembangunan industri keuangan syariah, dimana pemerintah dapat memberikan bantuan berupa insentif perpajakan, *tax holiday*, studi dan pengelolaan anggaran, merupakan permasalahan permodalan perbankan syariah yang harus dapat mandiri sebelum berdiri sendiri sesuai dengan misi bank syariah, kurangnya kerjasama antara regulator perbankan syariah dan pemerintah dalam membangun dan

mengembangkan industri keuangan berbasis syariah. Dukungan pemerintah terhadap industri keuangan syariah perlu dilakukan diantaranya kesempatan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara, pemberian insentif / *reward* pajak, *tax holiday* dan juga riset, kemudian terkait permodalan perbankan syariah dimana misinya adalah menjadi bank yang mampu mandiri sehingga dapat berdiri sendiri dan terpisah dari induknya tetapi karena kapasitas terbatas sehingga belum terpenuhi, selanjutnya biaya dana bank syariah yang merupakan dana mahal sehingga masyarakat kurang berminat dan komposisi dana bank syariah terdiri dari deposito 60% dan dana lainnya 40% sehingga struktur dana bank syariah kurang kompetitif.

Produk dan jasa perbankan syariah masih kurang bervariasi termasuk juga akses yang belum sepenuhnya didapat oleh masyarakat, kurang memadai kualitas SDM bank syariah yang karena hanya sedikit SDM berkualitas setidaknya untuk SDM dengan pemahaman terkait perbankan syariah karena sebagian SDM bank syariah merupakan SDM yang berasal dari bank induknya ataupun konvensional. Masih kurangnya masyarakat dalam memahami dan sadar tentang bank syariah. Dengan edukasi yang berkesinambungan kepada masyarakat diharapkan menarik minat masyarakat agar paham dan sadar untuk menggunakan perbankan syariah dalam transaksi keuangannya.

Dari penjelasan diatas, diketahui jumlah dewan komisaris menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sehingga diperoleh hasil dari pengujian uji t diatas dengan hasil penilaian berupa  $t_{tabel}$

lebih besar  $t_{hitung}$ . Hasil ini menunjukkan bahwa dengan lebih banyaknya dewan komisaris tidak memberikan efektifitas dalam pengawasan pada BUS karena semakin banyak dewan komisaris dapat menyebabkan pengawasan yang kurang optimal karena koordinasi dan komunikasi yang semakin kompleks. Hasil dari analisis ini terhadap hasil penelitian (Tarigan dan Prawihatmi; 2016) yang menyatakan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan (Rimardhani dkk; 2016) yang menyatakan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Hasil yang berbeda dari penelitian Hisamuddin dan Tirta (2012) serta Santoso dkk (2010) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ROA.

#### **4.2.2. Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Hasil penelitian dengan uji  $t$  menjelaskan bahwa jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $-0,195 < 1,996$ ) signifikan bernilai  $0,846 > 0,05$ . Hasil yang disajikan menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan berupa *Return On Assets* (Y).

Penjelasan terhadap hasil penelitian ini dan faktor luar yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah juga sama seperti yang disampaikan pada pembahasan jumlah dewan komisaris. Semakin besar

jumlah dewan direksi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan BUS. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perlunya jumlah dewan direksi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya dan resiko yang dihadapi perusahaan untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah dewan direksi menunjukkan hasil tidak berpengaruh, penjelasan hasil uji t diatas bahwa nilai  $t_{tabel} > t_{hitung}$ . Pemaparan terhadap hasil diatas menggambarkan bahwa semakin sedikit jumlah dewan direksi akan menciptakan komunikasi, perbaikan dan efektivitas koordinasi serta keputusan yang diambil dapat lebih efektif dan cepat dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini selaras dengan penelitian Rimardhani, Dwiatmanto (2016) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian Sementara peneliti lainnya Onasis & Robin (2016) menyatakan bahwa variabel jumlah dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA.

#### **4.2.3. Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

Dari penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa nilai  $t_{hitung}$  jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $-0,108 < 1,996$ ) signifikan bernilai  $0,915 > 0,05$ . Dari hasil yang disajikan tersebut maka  $H_0$  diterima yang berarti jumlah DPS ( $X_3$ ) tidak memberikan pengaruh terhadap

kinerja keuangan berupa ROA (Y).

Dari penjelasan penelitian tersebut, kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor luar perbankan syariah dengan variabel jumlah DPS adalah peran DPS yang penting dalam memberikan jaminan agar bank syariah beroperasi dengan berpedoman pada prinsip syariah dan perpanjangan tangan regulator dapat diberikan kepada DPS dalam menjamin tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah yang sehat di Indonesia.

Perlunya dukungan organisasi yang tersedia bagi DPS termasuk dukungan aturan berupa Undang-Undang, sumber daya insani yang memadai, manajemen yang baik dan fasilitas yang memadai sehingga perannya dapat optimal. Penjelasan mengenai hal ini adalah jumlah dewan pengawas syariah yang semakin besar tidak memberikan pengaruh terhadap ROA kepada BUS, dalam hal ini jumlah dewan pengawas syariah, dikutip dari PBI sedikitnya berjumlah 2 orang atau sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah direksi.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa jumlah DPS menunjukkan hasil tidak berpengaruh, penjelasan hasil uji t diatas menyatakan nilai  $t_{tabel} >$  dari  $t_{hitung}$ . Hasil ini menggambarkan bahwa DPS yang semakin sedikit akan memberikan peningkatan terhadap pengawasan atas pengelolaan bank syariah yang lebih efektif sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak mengurangi *profitabilitas* akibat tidak sesuainya penggunaan dana dengan prinsip syariah pada BUS.

Hasil penelitian yang disampaikan ini selaras penelitian Eksandy (2018) yang menyatakan bahwa DPS tidak memberikan pengaruh terhadap

kinerja keuangan. Septiputri & Mutmainah (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menerangkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

#### **4.2.4. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa hasil uji t yang dilakukan menunjukkan nilai perhitungan jumlah komite audit ( $X_4$ ) lebih kecil dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $2,064 > 1,996$ ) dengan nilai signifikan  $0,045 < 0,05$ . Dari hasil yang disajikan tersebut maka  $H_0$  ditolak yang artinya jumlah komite audit ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan berupa ROA ( $Y$ ).

Penjelasan terhadap hasil penelitian ini dan faktor luar yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah juga sama seperti yang disampaikan pada pembahasan jumlah dewan komisaris. Jumlah komite audit yang semakin besar memberikan pengaruh terhadap ROA BUS, dalam hal ini jumlah komite audit disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi audit internal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalisir terjadinya resiko yang dihadapi perusahaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Dari penjelasan diatas, jumlah komite audit menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap ROA. Hasil uji t diatas menjelaskan bahwa nilai  $t_{tabel}$  lebih kecil dari  $t_{hitung}$ . Hasil tersebut menjelaskan bahwa jumlah komite audit

yang semakin banyak akan memberikan dampak pengendalian dan evaluasi audit internal, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, efektif terhadap auditor eksternal sehingga didapatkan keputusan yang lebih akurat dalam memberikan solusi atas suatu permasalahan. Penelitian yang selaras adalah penelitian Onasis & Robin (2016) yang menjelaskan bahwa jumlah komite audit mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Penelitian yang berbeda dilaksanakan oleh Rimardhani dkk (2016) bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

#### **4.2.5. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

Berdasarkan hasil penelitian ini, Hasil uji F menunjukkan nilai hitung secara simultan atau serentak jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ), jumlah dewan direksi ( $X_2$ ), jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) dan jumlah komite audit ( $X_4$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*Return On Assets*) ( $Y$ ) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perhitungan hasil  $F_{hitung} = 2,383$ , sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$ ,  $n = 72$  dan  $df = n - 4$  didapat nilai  $F_{tabel} 2,51$ . Dari hasil ini diketahui  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  ( $2,383 < 2,51$ ), signifikansi bernilai  $0,062$  atau  $>$  dari  $\alpha = 0,05$ , dimana  $H_a$  ditolak atau dapat disimpulkan  $H_0$  diterima yang artinya bahwa variabel jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ), jumlah dewan direksi ( $X_2$ ), jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) dan jumlah komite audit ( $X_4$ )

secara bersama-sama atau serentak tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) (Y) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019.

Dari penjelasan diatas, diketahui jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit secara simultan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara uji F yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa nilai  $F_{tabel} > F_{hitung}$ . Yang berarti bahwa secara atau simultan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit yang bertambah tidak memberikan efektifitas dalam pengelolaan, pengurusan operasional, pengendalian bank pada BUS. Demikianlah pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan berupa ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.yang telah dijabarkan oleh penulis dalam penelitian ini.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penelitian mendapatkan hasil dengan uji partial (uji t) bahwa jumlah dewan komisaris ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan berupa ROA (Y). Artinya semakin banyak atau bertambahnya jumlah dewan komisaris tidak memberikan peningkatan kinerja keuangan dan juga tidak memberikan kontribusi yang baik dalam pengawasan bank pada Bank Umum Syariah.
2. Penelitian mendapatkan hasil dengan uji partial (uji t) bahwa jumlah dewan direksi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berupa ROA (Y). Artinya semakin banyak atau bertambahnya dewan direksi tidak serta merta memberikan dampak pengelolaan operasional bank menjadi lebih baik atau meningkatkan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.
3. Penelitian mendapatkan hasil dengan uji partial (uji t) bahwa jumlah dewan pengawas syariah ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berupa ROA (Y). Artinya jumlah yang semakin banyak atau bertambahnya dewan pengawas syariah tidak memberikan dampak kepatuhan dan pengelolaan operasional bank menjadi lebih baik atau meningkatnya kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.
4. Penelitian mendapatkan hasil dengan uji partial (uji t) bahwa jumlah komite audit ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap kinerja keuangan berupa ROA (Y). Artinya

jumlah yang semakin banyak atau bertambahnya komite audit memberikan dampak kepatuhan, pengendalian, evaluasi audit internal bank dan koordinasi/komunikasi terhadap audit eksternal menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

5. Penelitian mendapatkan hasil dengan uji-F bahwa secara bersama-sama atau simultan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Artinya secara simulatan atau serentak semakin banyak atau bertambahnya jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah dan jumlah komite audit yang tidak berpengaruh menjadi lebih baik terhadap perbaikan kinerja dalam hal pengawasan, pengelolaan operasional dan kepatuhan bank yang pada akhirnya memberikan peningkatan kinerja keuangan bank berupa ROA pada Bank Umum Syariah.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, disampaikan saran – saran antara lain :

1. Perusahaan hendaknya dapat lebih memaksimalkan peranan dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit sehingga memberikan dampak positif terhadap *profitabilitas*.
2. Selanjutnya, penelitian kiranya dilaksanakan dengan menggantikan variabel terikat dan juga dapat dilaksanakan pada lembaga keuangan

lainnya termasuk pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Mengingat masih ada faktor selain jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit yang mempengaruhi *profitabilitas* untuk penelitian selanjutnya, kiranya perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang berasal dari luar penelitian ini yang mempunyai indikasi memberikan pengaruh terhadap *profitabilitas*.
4. Selanjutnya bagi peneliti yang akan datang, agar melaksanakan penelitian terkait topik yang sama untuk jenis perusahaan yang berbeda dan juga perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih memperbanyak variabel yang diteliti dan jumlah perusahaan yang memadai serta tahun penelitian yang berbeda sehingga dapat diketahui dengan jelas variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi *profitabilitas*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attar, Dini, Islahuddin, and M. dan Shabri. 2014. "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." 3(1): 10–20.
- Bukhori, Iqbal dan Raharja. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010).
- Eksandy, A. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah'Ah Indonesia. Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>
- Ekasari, O & Deny D.H. 2019. "Pengawasan Syariah, Tata Kelola, dan Kinerja Bank Syariah." *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 19(1): 51-62.
- Ernawatiningsih, Ni Putu Lisa. 2019. "Analisis Determinan Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Berwirausaha." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 4(1): 34.
- Fadillah, Adil Ridlo. 2017. "Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45." *Jurnal Akuntansi* 12: 37–52.
- Fauzi, Achmad Noor. 2016. "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015). Tesis. IAIN Surakarta.
- Febriani, J., M. Musadieg, and T. Afrianty. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Tuban)." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 32(1): 82–89.
- Fitri, Alfiana. 2016. "Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 7(2): 176.
- Hani, Syafrida. 2012. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pemilihan Akuntansi Konservatif." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 12(1): 1-16.
- Hartono, Daniel Felimanto, and Yeterina Widi Nugrahanti. 2014. "Pengaruh Mekanisme GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan." 3(2): 191–205.
- Hendro, Hendro, and Ratna Wardhani. 2016. "Pengaruh Agency Cost of Free Cash Flow Terhadap Tingkat Konservatisme Dan Pengujian Efek Moderasi Kebijakan Hutang, Pendistribusian Kas, Persistensi Kas, Dan Tata Kelola Perusahaan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 17(1): 41–56.
- Hikmah, Is'ada Rahmawati, (2013), *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, *Accounting Analysis Journal(AAI* 2(1) 2013)

- Hisamuddin, N., & Tirta K, M. Y. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>
- Juliandi, Azuar., & Irfan, M.S., S.B. 2016, *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, ISBN 978-602-52676-9-7.
- Kangmartono, Bobby G H. 2015. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan." 4(2): 370–80.
- Karyadi, Iman. 2018. "Keuangan Perusahaan ( Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index )." 16(3): 392–402.
- Khairiyani. 2018. "Bagaimana Tata Kelola Internal Perusahaan Pertambangan?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(2): 365–76.
- Kholid, Muamar Nur, and Arief Bachtiar. 2015. "Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 19(2): 126–36.
- Kodriyah. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba." *Jurnal Akuntansi* 4(2): 59–64.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2012, Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia.
- Krisnaryatko, Niko, and Ika Kristianti. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Du Pont System ( Studi Pada Nvidia Corporation Dan Advanced Micro Devices , Inc . Tahun 2015-2017 )." *Politeknik Caltex Riau* 12(2): 77–86.
- Kusumawardani, D. 2014. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2012)." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 9(2): 81340.
- Lo, Eko Widodo. 2012. "Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Terhadap Manajemen Laba: Teori Keagenan versus Teori Signaling." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8(1): 1–18.
- Luthfy, Angga, Al Ijje, and Suryono Budi Santoso. 2015. "Analisis Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepercayaan Pelanggan Sebagai Intervening (Studi Pada Mahasiswa Undip Pengguna Smartphone Sony)." 4(4): 120–29.

- M, Muh Sabir, Muhammad Ali, and Abd Hamid Habbe. 2012. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia." *Jurnal Analisis* 1(1): 79–86.
- Maith, Hendry Andres. 2013. "Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT.Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk ." *Jurnal EMBA* 1(3): 619–628.
- Mardiyati, Umi, and Yunika Murdayanti. 2017. "Pengaruh Ukuran Dewan, Kepemilikan Saham Oleh Direktur, Dan Jender Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan." *Jurnal Manajemen* 20(3): 402–15.
- Meidyna, I.A.N & Mertha, Made. 2019. "Pengaruh Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen dengan Investment Oppurtunity Set Sebagai Variabel Pemediasi." *E-JA* 30(1): 212–225.
- Muhammad Saifi. 2019. "Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Profit* 13(02): 1–11.
- Nizamullah, Darwanis, 2014. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)." *Jurnal Administrasi Akuntansi* 3(2).
- Onasis, Kristie & Robin, 2016. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI" *Bina Ekonomi* 20(1): 1-22.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2016. POJK No 65/23/. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*, 1–31. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-Bank-Umum.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. "Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Desember 2018." *Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan* 17(1): 172.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. 2017. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24(1): 113–29.

- Prasinta, D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2012). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–7. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Prasojo, Prsojo. 2015. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 2(1): 59–69.
- Pratiwi, Leni Nur, Endah Dwi Kusumastuti, and Selvia Nuriasari. 2018. “Pengaruh Implementasi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” 10(2): 30–37.
- Pudail dkk. 2018. “Good Corporate Governance -.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4(1): 127–49.
- Purwanto. 2019. “Meningkatkan Profitabilitas Dengan Menerapkan Islamic Corporate Identity (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017)” *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah: Iqtishadia*: 6(2): 131–140: DOI: 10.19105/iqtishadia.v6i2. 2350.
- Puspitasari, Filia, and Endang Ernawati. 2010. “Pengaruh Mekanisme.” *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 1999(2): 189–215.
- Rimardhani, H., R. Hidayat, and D. Dwiatmanto. 2016. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014).” *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 31(1): 167–75.
- Rumini & Hascaryo, Prayuda Wibi. 2015. “Perbandingan Hasil Analisis Menggunakan Software SPSS 17 Dan Smart PLS.2.0.” *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2015*: ISSN 2302-3805: 5.8–25.
- Santoso, Eko Budi. 2010. “Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 6(2): 125–37.
- Sari, Eka Nurmala. 2012. “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12(2): 25-54.
- Septiputri, Virda Rakhma, and Siti Mutmainah. 2013. “Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011.” *Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011* 2: 211–19.
- Situmorang, Christina Verawaty, and Arthur Simanjuntak. 2019. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi* 5(2): 160.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan 1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Sulastri, EM, DAN. 2017 “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terindeks Oleh CGPI), Issn : 1412 – 6613 e-Issn : 2527 – 4570.” 2(2): 35–45.
- Supriatna, Nono, and Anggita M. Kusuma. 2009. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan.” *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 1(1): 1.
- Tarigan, Liyandri R. 2015. “Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang, Indonesia Info Artikel \_\_\_\_\_.” : 125–43.
- Tertius, Melia Agustina & Christiawan, Yulius Jogi. 2015. “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan, *Bussiness Accounting Review*. 3(1): 223–232.
- The Financial Services Authority*. 2014. “*Assessment of Soundness of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Units*.” (10/SEOJK.03/2014): 1–108.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Untu, Christian. 2016. “Aspek Hukum Kedudukan Dan Peran Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. *Lex Administratum IV* (4): 188-196.
- Utomo, Agung Priyo. 2007. “Kajian Tentang Pengaruh Two Stage Cluster Sampling Terhadap Statistik Uji-F.” *Jurnal Matematika, sains dan teknologi* 8(2): 89–97.
- Widagdo, Dominikus Octavianto Kresno, and Anis Chariri. 2014. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap.” *Diponegoro Journal Of Accounting* 4(3): 67–77.
- Yusi, Syahirman & Idris, Umiyati. 2016. “Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi, Bisnis dan Sosial ” UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang.
- Zarkasyi, Ahmad. 2016. “Manajemen Kinerja Dalam Tafsir Al-Qur’an Dan Hadist Pendekatan Filsafat Tematik.” *qolamuna : Jurnal studi islam*, 2(1): 133–50. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/4138>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : Ronny. S  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 07 September 1976  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Brigadir Jenderal Katamso Gg.  
Kenanga No.22 Kampung Baru Medan Maimun  
Kota Medan  
Anak ke : 2 dari 5 orang bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : H. Syamsuddin  
Nama Ibu : Hj. Rosnelly Tanjung

### **Pendidikan Formal**

SD Swasta Yapena 45 Medan : 1982 - 1988  
SMP Negeri 2 Medan : 1988 - 1991  
SMA Negeri 12 Medan : 1991 - 1994  
Fakultas Ekonomi UMSU : 1994 - 2001  
Pascasarjana UMSU : Masih tercatat sebagai Mahasiswa  
Pascasarjana UMSU 2018 - 2020

### **Pengalaman Bekerja**

PT. Bank Sumut : 2005 sampai dengan sekarang



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berkarya

Itika menajwab nani ini agar diabrtikan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [ppe@umsu.ac.id](mailto:ppe@umsu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Ronny. S  
NPM : 1820050029  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Judul Tesis : Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia  
Tgl. Seminar Proposal : 2 Mei 2020

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	7 Agustus 2020	Sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman	
2	16 Agustus 2020	Deskripsi variable penelitian diuraikan dengan jelas	
3	27 Agustus 2020	- Hasil analisis data dilengkapi dengan sub struktur yang jelas. - Pembahasan diuraikan dengan jelas, lihat kembali rumusan masalah dan hasil pengolahan data	
4	3 September 2020	- Pembahasan dipertajam kembali - Lampirkan kuesioner dan data serta hasil pengolahannya	
5	15 September 2020	- Perbaiki kesimpulan dan saran - Abstrak penelitian dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris	
6	24 September 2020	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 25 September 2020

Pembimbing I,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Pembimbing II,

Dr. Irfan, S.E., M.M

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Denal No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)

E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Ronny. S  
NPM : 1820050029  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Judul Tesis : Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia  
Tgl. Seminar Proposal : 2 Mei 2020

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	16 Agustus 2020	Abstrak	
2	3 September 2020	- Deskripsi data - Analisis data - Pembahasan	
3	19 September 2020	- Kesimpulan & Saran - Pustaka	

Medan, 25 September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA, CPA

Dr. Irfan, S.E., M.M

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris ,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA, CPA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berkarya

Dika menjabah aset ini agar diinformasikan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Denal No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)

E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : Romny. S  
NPM : 1820050029  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Judul Tesis : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	23-11-2019	- Konsultan judul - Lengkapi data pendukung	
2	01-02-2020	- Latar belakang masalah dilengkapi dengan data pendukung - Identifikasi masalah dilengkapi	
3	13-03-2020	- Penambahan landasan teori pendukung - Kerangka konseptual dan hipotesis	
4	27-03-2020	- Perbaiki penelitian terdahulu di kerangka berpikir - BAB III populasi, sampel, definisi operasional, teknik analisis data, pengujian hipotesisnya dilengkapi - Lihat kembali pedoman penulisan tesis	
	16-04-2020	- Selesai bimbingan proposal	

Medan,

Pembimbing I,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Pembimbing II,

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA



**UMSU**  
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan

Dika menjabar surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Denal No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)

E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : Rommy. S  
NPM : 1820050029  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Judul Tesis : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	16-01-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tata cara penulisan proposal</li><li>- Identifikasi masalah dan rumusan masalah</li><li>- Penulisan tujuan penelitian</li><li>- Kerangka konseptual dan hipotesis</li><li>- Pendekatan dan definisi operasional</li></ul>	
2	07-03-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masalah penelitian</li><li>- Rumusan masalah</li><li>- Teori dan kerangka konseptual</li><li>- Hipotesis</li><li>- Populasi dan sampel</li></ul>	
3	15-03-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Selesai bimbingan proposal</li></ul>	

Medan, 15 Maret 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Irfan, S.E., M.M., P.hD

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris ,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA.